

KONSEP PEMERINTAHAN DALAM ISLAM
(Studi Terhadap Pemerintahan Khilafah Menurut Ali Abdur Raziq)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ushuluddin**



OLEH

AZRUL HAKIM
NIM. 10931008972

**PROGRAM S1
JURUSAN AQIDAH FILSAFAT**

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

2011

ABSTRAKSI

Ali Abdur Raziq merupakan seorang tokoh politik yang berasal dari partai al Ahrar ad Dusturiyyin yang mendapat dukungan dari kerajaan Inggris. Lawan dari partai al Ittihad dukungan pemerintah. Beliau menuntut agar sistem khilafah dihapuskan dari kerajaan Turki Usmani. Bahkan dia menganggap Islam tidak menganjurkan sistem khilafah yang dianggapnya tidak memiliki dasar-dasar langsung dari ajaran Islam. Islam tidak menganjurkan umatnya mematuhi sistem khilafah yang ada di muka bumi saat ini. Dalam al Qur'an, as Sunnah, Ijma dan Qias menurut Ali Abdur Raziq, tidak tertulis kewajiban untuk sebuah Negara mengangkat seorang khalifah, yang dianggap sebagai pemimpin agama dan Negara.

Pemerintahan khilafah menurut Ali Abdur Razig lahir sebagai proses evolusi karena kebutuhan akan seorang pemimpin selepas Rasulullah, maka muncullah pendapat bahwa pemimpin harus memiliki tugas ganda, yaitu sebagai pemimpin agama dan pemimpin dunia. Ini jelas tidak memiliki dasar dari ajaran Islam dan harus dihapuskan dari pemikiran umat. Hanya kekuatan senjata dan pemaksaanlah yang melahirkan sistem khilafah sepeninggal berakhirnya masa Khulafa al Rasyidin. Islam menurut Raziq memberikan kebebasan kepada umatnya untuk memilih sistem pemerintahan apapun yang terbaik bagi umat dengan catatan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Tidak ada standar dan target khusus tentang bentuk-bentuk pemerintahan yang harus dianut oleh umat. Raziq bahkan tidak menolak sekularisme yang memisahkan agama dan pemerintahan jika falsafah ini mampu memberi kebebasan dan kesejahteraan kepada rakyat. Pemimpin Negara bukanlah pemimpin agama. Masing-masing bertugas secara terpisah.

Kajian yang telah dibuat ini berusaha menyelami pemikiran Ali Abdur Raziq yang menolak sistem Khilafah Islamiyah. Argumentasi beliau dijelaskan dengan sedapatnya membuat analisis dari sudut pandangan penulis dan ulama-ulama yang tidak sepaham dengan beliau.

Penulis,

Azrul Hakim

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAKSI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Alasan Memilih Judul	4
D. Penegasan Istilah	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
F. Kerangka Teoritis	6
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	11
 BAB II ALI ABDUR RAZIQ GAMBARAN SEORANG SYEIKH .	
A. Riwayat Hidup	15
B. Kehidupan Politik	15
C. Sebuah Buku dan Permasalahannya.....	18
 BAB III KONSEP PEMERINTAHAN DALAM ISLAM	 24
A. Pandangan Umum	24
B. Pandangan Ali Abdur Raziq Terhadap Sistem Khalifah.....	57
 BAB 1V ANALISIS TERHADAP KONSEP KHILAFAH	
MENURUT ALI ABDUR RAZIQ	 66
A. Analisis Tentang Konsep Al Qur'an Tentang Pemerintahan dalam Pandangan Ali Abdur Raziq	66

B. Kedudukan Konsep Ali Abdur Raziq dalam Konstalasi Pemikiran Politik Dunia Islam	75
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran-Saran.	80
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tiga belas bulan selepas Kamal Attaturk mengumumkan dihapuskannya sistem khilafah di negaranya, muncul Ali Abdur Raziq yang mendukung dihapusnya khilafah dan menolak eksistensinya dalam ajaran Islam, melalui bukunya yang berjudul *Al-Islam Wa ushul Al-Hukm*.¹

Kamal Attaruk mendeklarasikan hapusnya sistem khilafah di Turki pada awal Maret 1924 dan membuang keluarga khilafah terakhir yang berkuasa pada saat itu yakni Sultan Abdul Majid II. Apa yang menggerakkannya menghapuskan sistem itu adalah memburuknya situasi negara Turki dan juga tindakan sewenang-wenang penguasa seperti Sultan Abdul Hamid. Tambah pula dalam perang dunia I Turki mengalami kekalahan meskipun itu bukanlah kesalahan Sultan Muhammad V yang memerintah selepas Sultan Abdul Hamid. Dalam kondisi demikian muncul Mustafa Kamal Attaturk yang membawa pasukan pembela tanah air untuk menyongsong musuh bagi membalikkan kekalahan menjadi kemenangan.

Pada saat itulah Sultan Mahmud VI jatuh ketangan Partai nasional pimpinan Mustafa Kamal. Maka tidak heranlah jika dia memakzulkan khalifah

¹ Dr. Dhiya' Ad-Din ar-Rias, *Al-Islam wa al-Khilafah fi al-Atsar al-Hadits*, (Naqd kitab *Al-Islam wa Ushul*, Kairo, 1972).

dan menghapuskan sistem khilafah karena tidak ingin ada kekuasaan lain yang menandinginya.²

Ali Abdur Raziq mengikuti jejak Kamal Attaturk dalam hal penghapusan khilafah pada bulan April 1925, ia menuntut agar sistem khilafah dihapuskan dari kerajaan Usmani dengan alasan yang banyak menimbulkan kontroversi dikalangan pemikir dunia Islam umumnya dan Mesir khususnya.

Inti dari pernyataannya adalah bahwa sistem khilafah itu sama sekali tidak memiliki asas di dalam agama, karena Islam itu sendiri tidak terkait dengan masalah yang berhubungan dengan sistem pemerintahan baik yang bersifat khilafah maupun bentuk negara lain.

Ali Abdur Raziq menilai agama adalah lawan dari dunia, oleh karena itu hal-hal yang berkaitan dengan dunia tidak diatur dalam agama, sebab dua hal yang sifatnya kontradiktif tidak dapat disatukan.

Sementara itu Rasyid Ridha mendasarkan keyakinannya bahwa mendirikan khilafah itu merupakan keharusan agama, berdasarkan surat An-Nisa' ayat 59 yang memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah, rasulnya dan Ulil Amri mereka.³

Sementara Ali Abdur Raziq tidak dapat menemukan dalil yang kuat untuk mendukung kepercayaan terhadap wajibnya mendirikan khilafah bagi umat Islam, baik dalam Al-Quran, Hadist, Ijma maupun Qias.

Surat An-Nisa' ayat 59 dan ayat 83 tidaklah mengandung dalil apapun yang cocok untuk diterapkan bagi wajibnya khilafah seperti yang disebutkan oleh

² *I b i d.* , hlm.27.

³ H. Munawir Sazali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, Jakarta Universitas Indonesia, cet. III, 1999, hlm. 140

para ulama. Kandungan maksimal yang dapat diambil dari ayat itu adalah keharusan bagi umat Islam untuk memiliki orang yang dapat dijadikan tempat rujukan atas persoalan yang dihadapi. Itulah makna yang lebih luas dibanding dengan arti khilafah yang mereka sebut.⁴ Dalam makna ini, Ulil Amri hanyalah tempat bertanya dan konotasinya dengan khilafah tidaklah sama.

Tidak wajibnya *khilafah*, *immamah*, *bai'at*, *jihad* dan sebagainya walaupun disebut dalam Al-Qur'an sama kedudukannya dengan tidak dianjurkannya perbudakan, hutang, talak, gadai dan sebagainya walaupun disebut dalam kitab tersebut.

Dalam pandangan beliau, sistem pemerintahan sama sekali tidak pernah disinggung oleh Al-Qur'an maupun Hadist, karena itu corak dan bentuk negara bukanlah urusan agama melainkan urusan duniawi dan diserahkan kepada akal untuk menentukannya.⁵ Hampir pada akhir bagian kedua dari buku beliau terdapat kesimpulan :

*Nabi Muhammad adalah semata-mata Rasullullah untuk mendakwahkan agama murni tanpa maksud untuk mendirikan negara. Nabi tidak mempunyai kekuasaan duniawi, Negara, maupun pemerintahan. Nabi tidak mendirikan kekuasaan dalam arti politik atau sesuatu yang mirip dengan kerajaan. Dia adalah nabi semata seperti halnya para nabi sebelumnya, dia bukan raja, bukan pendiri negara dan tidak pula mengajak umat untuk mendirikan kerajaan duniawi.*⁶

Kajian ini menitikberatkan kepada konsep pemerintahan dalam Islam, terutama sekali yang dikemukakan oleh Ali Abdur Raziq', seorang hakim

⁴ Ali Abdur Raziq, *Al-Islam wa Ushul Al-Hukm (Bahts fi al Khilafah wa al-Hukumah)*, penter ; Afif Muhammad (Mesir ; *Mahtba'ah Mishr*, 1925), hlm.25.

⁵ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam:Sejarah dan Gerakan*, (Jakarta : Bulan bintang), cet VIII, 1990, hlm. 85

⁶ Munawir Sazali, *Op.Cit*, hlm. 142

mahkamah Syariah di Mesir. Apa yang menarik dari kajian ini adalah adanya pendapat yang kontroversial dari tokoh ini tentang tidak pentingnya suatu negara Islam, baik yang berbentuk khilafah sekalipun, juga tentang keraguannya akan kejayaan *Khulafaurrasyidin* dalam memimpin umat Islam selepas wafatnya Rasulullah SAW. Ide yang dikemukakan beliau melahirkan distorsi dikalangan tokoh pembaharu dan ulama khususnya.

Dari uraian latar belakang masalah ini, tampak bahwa kajian tentang konsep pemerintahan dalam Islam terutama sekali yang berkaitan dengan khilafah yang dikemukakan oleh Ali Abdur Raziq masih sangat diperlukan. Dalam tulisan ini penulis akan mencoba mengkaji apa dan bagaimana sebenarnya pemerintahan Islam dalam pandangan beliau.

B. PERMASALAHAN

Untuk lebih jelasnya dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diungkapkan dalam kajian ini:

1. Kenapa Ali Abdur Raziq berusaha menolak sistem pemerintahan khilafah dalam Islam?
2. Apakah konsep dalam pemerintahan Islam yang dikemukakan oleh Ali Abdur Raziq?

C. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Pemilihan judul ini penulis lakukan karena ada beberapa hal penting yang ingin diungkap diantaranya :

1. Mengetahui pandangan Islam terhadap sistem pemerintahan yang dianut umat Islam dan agama Islam pada umumnya.
2. Mengungkapkan alasan Ali Abdur Raziq menentang sistem pemerintahan khilafah.
3. Mencari dan menemukan jalan terhadap sistem pemerintahan yang bisa dibentuk disebuah negara yang mayoritas beragama Islam.

D. PENEGASAN ISTILAH

Untuk menghindari kesalahfahaman dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah dan kata kunci, yaitu *pemerintahan* dan *khilafah*.

1. Pemerintahan; proses ataupun cara memerintah. Juga menanti segala urusan yang di jalankan oleh negara dalam menggunakan kesejahteraan rakyat dan masyarakat bagi kepentingan negara.⁷
2. *Khilafah*; satu pola pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi dan mutlak berada pada seseorang kepala negara yang bergelar khalifah, pengganti Rasulullah dengan kewenangan mengatur kehidupan dan rumusan umat.⁸

Jadi yang dimaksud dengan pemerintahan khilafah dalam penelitian ini adalah proses atau cara memerintah suatu negara dimana penguasaannya adalah seorang kepala negara yang bergelar khalifah.

⁷ Wjs. Puwadarminta, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, hlm. 503.

⁸ Munawir Sazali, *Op.Cit*, hlm. 140

E. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan kajian berdasarkan permasalahan yang diteliti dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui alasan Ali Abdur Raziq menolak sistem pemerintahan khilafah.
- b. Untuk mengetahui konsep pemerintahan yang ditawarkan oleh Ali Abdur Raziq.
- c. Dijadikan salah satu referensi dalam bidang kajian ilmu keIslaman yang berkaitan dengan bidang pemerintahan Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi :

- a. Bukti akhir penulis dalam menguasai disiplin keilmuan Ushuluddin.
- b. Penelitian yang serius tentang pemerintahan Khilafah yang diharapkan akan muncul penelitian lanjutan tentang kajian ini.

F. KERANGKA TEORITIS

Pemerintahan Islam berbeda dengan pemerintahan lain. Pemerintahan Islam tidak berdasarkan pada konsep kebangsaan dan ras, melainkan semata-mata berdasarkan ideologi Al Qur'an dan Sunnah Rasul. Saat ini umat Islam belum mempunyai pandangan-pandangan yang jelas mengenai cara pemerintahan dan organisasi yang akan memberikan suatu konsep pemerintahan yang bersifat Islamiah, sekaligus sesuai dengan keadaan zaman. Tapi mungkin ada yang bertanya: Apakah Islam sungguh-sungguh mengharapakan kepada kaum muslimin

agar berusaha dalam membentuk pemerintahan Islam ? Ataukah hasrat kearah itu hanya berdasarkan kenang-kenangan kepada sejarah Islam di masa yang lampau? Apakah Islam sungguh-sungguh dibentuk begitu rupa sehingga menuntut pengikutnya menempuh satu tindakan politik tertentu, atau seperti yang dilakukan bangsa lain, Islam membiarkan kita untuk menentukan garis politik yang ingin dianutnya sesuai dengan kebutuhan zaman?

Hubungan erat antara agama dan politik merupakan suatu ciri sejarah perkembangan Islam, banyak yang tidak dapat diterima oleh kaum terpelajar Islam yang telah mendapat pendidikan Barat modern, yang sudah biasa memandang soal-soal kepercayaan dan kehidupan praktis, adalah mustahil bila kita bisa memperoleh suatu penilaian yang tepat tentang Islam tanpa mencurahkan perhatian sepenuhnya pada masalah ini.

Jika kita teliti secara objektif peraturan Al Qur'an dan As-Sunnah mengenai negara, akan kita temukan keduanya tidak menetapkan suatu bentuk negara yang khusus selain asas-asas yang terkandung didalamnya.

Kebutuhan-kebutuhan politik, sosial dan ekonomi manusia terikat oleh waktu, karena itu gampang berubah. Perundangan dan lembaga yang ditetapkan secara kaku tidak akan cocok dengan kecenderungan dunia yang terus berubah, karena itulah maka syari'ah tidak mencoba melakukan sesuatu yang mustahil.

Kajian ini di titik beratkan kepada buku *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*, Karangan Syaikh Ali Abdur Raziq yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Afif Muhammad dengan judul *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*. Serta buku lain yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

Masalah yang berkaitan dengan pemerintahan dalam Islam khususnya Khilafah oleh Ali Abdur Raziq belum banyak dibahas oleh para pemikir khususnya mahasiswa, kecuali hanya beberapa tulisan berbentuk kritik, antara lain yang dilontarkan oleh Dhiya'ad-Din ar-Rais dalam bukunya yang berjudul *Al-Islam wa al-Khilafah fi al-Atsar al Hadist*. (lawan dari kitab *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*) yang diterjemahkan oleh Afif Mohammad menjadi *Islam dan Khilafah (Kritik terhadap buku Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, karangan Ali Abdur Raziq.

Selain itu kita dapat tokoh yang mendukung Ali Abdur Raziq dan melecehkan konsep negara Islam dan menentangnya. Dalam bukunya *Ayya Laha Tarikh* (Hari-hari bersejarah), Sayyid Baha Addin membahas kitab *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*. Beliau meyakinkan sepenuhnya bahwa Ali Abdur Raziq itu seluruhnya benar dan semua orang yang menentangnya dipihak yang salah.⁹

Tokoh yang memulai polemik panjang atas pandangan Ali Abdur Raziq ini adalah Muhammad Husein Heikal seorang pemikir dan sejarawan modern. Pandangannya dituangkan dalam surat kabar *As-Siyasah* yang berisikan pembelaan terhadap sahabatnya sejak kecil, yaitu Ali Abdur Raziq.¹⁰

Secara umum pemerintahan itu adalah proses ataupun cara memerintah. Pemerintahan itu juga berarti segala urusan yang dijalankan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan masyarakat bagi kepentingan negara.¹¹

⁹ Dr. Dhiya' ad-din Ar-Rais, *Op Cit.* , hlm.9

¹⁰ *I b i d*, hlm. 26

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Loc Cit.*

Khilafah sebagai salah satu sistem dalam pemerintahan Islam selalu menjadi perdebatan, ada yang ingin mengekalkan dan ada pula yang ingin menghapuskannya dari ajaran Islam dengan argumentasi yang berbeda.

Khilafah secara ketat merujuk pada periode sesudah Nabi, sama halnya dengan konsep *Imamah* sebagai suatu konsep politik yang dikembangkan oleh para penganut Syi'ah pada abad pertengahan adalah hasil perumusan belakangan.¹²

Khilafah bermuara pada perkataan khalifah, yakni wakil nabi Muhammad SAW dan gelar bagi kepala agama dan raja di negara Islam.¹³

Khilafah dalam pandangan Al-Baidhawi adalah pernyataan yang berkenaan dengan penggantian fungsi Rasulullah oleh seseorang untuk menjalankan undang-undang syariah dan melestarikan ajaran-ajaran agama dalam suatu garis yang mesti diikuti oleh umat.¹⁴

Dalam pandangan Ali Abdur Raziq khalifah adalah satu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi dan mutlak berada pada tangan seorang kepala negara (pemerintah) dengan gelar khalifah, pengganti Rasulullah dengan kewenangan untuk mengatur kehidupan dan urusan umat, baik keagamaan maupun keduniaan, yang hukumnya wajib bagi umat untuk patuh dan taat sepenuhnya.¹⁵

¹² Ahmad Syafei Ma'rif, *Islam dan Masalah Kenegaraan (Studi dalam Konstituante)*, Jakarta LP3ES, cetakan II, 1987, hlm.20

¹³ Purwadarminta, *Op.Cit*, hlm. 503

¹⁴ Ali Abdur Raziq, *Loc.Cit*.

¹⁵ Munawir Sazali, *Op.Cit*, hlm. 46.

G. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini semata-mata berdasarkan *library research* (riset perpustakaan), mengingat data yang diperlukan dapat diperoleh melalui studi kepustakaan yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

2. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang bersumber dari karya Ali Abdul Raziq sendiri yaitu : *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm*.
- b. Data sekunder adalah buku-buku yang ada membicarakan tentang konsep khilafah dan buku-buku yang menolak pandangan khilafah Ali Abdul Raziq.

3. Pengumpulan Data

Data yang dihimpun bersumber dari buku *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm* Karangan Ali Abdul Raziq serta buku-buku yang ada kaitan dengan hal ini. Adapun langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Langkah pertama yang ditempuh mengumpulkan beberapa buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- b. Langkah kedua buku-buku tersebut ditelaah berulang kali dengan saksama, kemudian dicatat hal-hal yang dianggap perlu.

4. Analisis Data

Dikarenakan studi ini merupakan penilaian terhadap tokoh yang bersifat deskriptif analitis, maka setelah data disusun lalu dianalisis secara deduktif

dan komparatif (perbandingan dengan pendapat para ilmuwan dan jumhur ulama).

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih terarahnya pembahasan ini, skripsi ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab akan dibagi lagi kepada beberapa sub bab sesuai dengan keperluan pembahasan dan tuntutan penguraian.

Bab satu merupakan pendahuluan, di dalamnya akan diuraikan tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan diakhiri dengan dengan sistematika penulisan.

Bab dua menjelaskan secara umum tentang Ali Abdur Raziq: Potret seorang pemikir yang berisikan: riwayat hidup, kehidupan politik serta sebuah buku yang kontroversial.

Bab tiga mengemukakan tentang Konsep Pemerintahan dalam Islam menurut Ali Abdur Raziq, yang berisikan; pandangan umum terhadap sistem pemerintahan dan pandangan Ali Abdur Raziq terhadap pemerintahan.

Bab empat akan menjelaskan tentang analisis terhadap konsep khilafah menurut Ali Abdur Raziq yang berisikan; konsep Al-Qur'an tentang pemerintahan dalam pandangan Ali Abdur Raziq, serta kedudukan konsepsi Ali Abdur Raziq dalam konstelasi pemikiran politik Islam.

Bab lima merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang direkomendasikan untuk perbaikan selanjutnya.

BAB II

ALI ABDUR RAZIQ

GAMBARAN SEORANG SYEIKH

A. RIWAYAT HIDUP

Ali Abdur Raziq dilahirkan di pedalaman propinsi Menia, Mesir pada tahun 1888 dari keluarga feodal yang aktif dalam kegiatan politik. Ayahnya Hasan Abdur Raziq seorang *Pasya* besar yang mempunyai pengaruh dan memiliki tanah yang luas.

Hasan Abdur Raziq, ayah dari Ali Abdur Raziq aktif dalam dunia politik, bahkan ia pernah menjadi wakil ketua partai rakyat (*Hizb al-ummah*) pada tahun 1907. Setelah revolusi 1919, dibentuk partai baru yang bernama '*hizb al-dusturiyyah*', merupakan kelanjutan dari partai *Hizb al-ummah* yang punya hubungan rapat dengan Inggris. Ali Abdur Raziq mempunyai kakak yang bernama Hasan (kecil) Pasya Abdur Raziq seorang agen inggris pada masa perang dunia I dan juga Musthafa Abdur Raziq, yang pernah menjadi menteri waqaf, akan tetapi ia lebih menyenangi ilmu daripada politik. Ia dihargai orang dan pada masa akhir hayatnya diangkat menjadi Syeikh al-Azhar.

Ali Abdur Raziq belajar di al-Azhar pada usia yang relatif amat muda. Ia mempelajari hukum pada syeikh Ahmad Abu Khatwah, sahabat Abduh. Khatwah sebagaimana Abduh adalah murid Jamaluddin Al-Afghani. Selama satu atau dua tahun mengikuti perkuliahan di Al-Mishiriyah.

Setelah memperoleh ijazah *Alimiyah* dari Al-Azhar tahun 1911, maka tahun 1912 beliau mulai mengajar di universitas yang sama. Tapi pada

pertengahan tahun 1912 ia berangkat ke Inggris untuk belajar di Universitas Oxford. Disini ia mempelajari ekonomi dan politik. Tahun 1915 ia kembali ke Mesir dan di angkat menjadi hakim Mahkamah Syari'ah.¹

Beliau adalah pengikut Abduh meskipun tidak sempat belajar langsung darinya, oleh karena Abduh wafat pada tahun 1905, Ali baru berusia 17 tahun.² sedangkan Ali Abdur Raziq wafat pada tanggal 22 September 1966.³

Sekalipun ia tidak sempat menjadi murid Muhammad Abduh, namun pengaruh Abduh sangat berkesan pada dirinya, ia juga berfikir liberal, tidak terkait cara berfikir tradisional.⁴

Berbeda dengan saudaranya Musthafa Abdur Raziq, yang pernah di Paris menjabat Rektor Al-Azhar dari tahun 1945 sampai 1947, Syeikh Ali Abdur Raziq menjalani sisa hidupnya dengan ketidakpastian.⁵

Peristiwa penting yang terjadi dalam hidupnya, yakni yang menjadikan namanya demikian termasyhur adalah penerbitan bukunya. Dalam kata pendahuluan ia mengatakan bahwa telah menghabiskan waktu bertahun-tahun lamanya, dan karyanya itu baru rampung pada awal April 1925. Dengan demikian buku itu baru terbit pertengahan tahun itu pula. Dan pada sampulnya tertera judul "*Al-Islam wa Ushul al-Hukm*". Setelah buku itu terbit dengan serta merta ia

¹ Lihat pengantar oleh Ahmad Tafsir, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, penterj ; Afif Muhammad

² H. Munawir Sazali, *Op Cit*, hlm. 139

³ Dhiya' ad-din ar-Rais, *Op Cit*, hlm. 139

⁴ Zul 'asri, *Op Cit* , hlm. 5

⁵ Maryan Jamelah, *Islam dan Modernisme*, penterj : A.Januri da Syafiq , Mughni (Surabaya; Usaha nasional,tt), hlm. 202

mendapatkan tanggapan dan tak kurang juga kritikan yang datang dari kalangan ulama.

Bantahan-bantahan mulai muncul di penghujung bulan April dan selanjutnya semakin menjadi-jadi dan tidak dapat dibendung lagi, sehingga berubah menjadi semacam perang tanding dan kacau diikuti oleh keterlibatan lembaga-lembaga resmi dan dari sanalah muncul perkembangan politik yang amat rawan.

B. KEHIDUPAN POLITIK

Pendidikan politik Ali Abdur Raziq diperoleh di Universitas Oxford, sejak tahun 1914. Keluarga Ali Abdur Raziq adalah orang-orang yang senantiasa bergulat dalam kehidupan politik.

Ayahnya dan saudara-saudaranya merupakan orang kuat di Hizbul Ummah. Setelah Syeikh Musthafa Abdur Raziq berhenti dari jabatan sebagai menteri wakaf di Mesir dan menjadi syeikh Al-Azhar. Maka kedudukan menteri wakaf dipegang oleh Ali Abdur Raziq dan memperoleh gelar Pasya. Kemudian ia dipilih sebagai anggota lembaga bahasa (*majma'al lughawi*) serta jabatan-jabatan lain.⁶

Dalam kehidupan politiknya, ia dan keluarga merupakan pendukung utama raja Fuad, dan partainya yang merupakan kekuatan koalisi Raja.⁷ Partai *Al-Ahrar* yang dilindungi oleh gubernur jenderal Inggris untuk mesir, Lord Allenby, merupakan partai yang bersaing ketat dengan partai *al-Ittihad*. Dalam pandangan

⁶ Dhiya' ad-Din ar-Rais, *Op Cit*, hlm. 26

⁷ *I b i d*, hlm. 63

istana, koalisi dua partai ini hanyalah merupakan *cash progame* yang bersifat sementara yang amat ditentukan perkembangannya dengan kondisi yang ada. Partai *al-ittihad* dibentuk untuk maksud tertentu, yaitu menghimpun seluruh kekuasaan di tangan raja apabila kondisi telah memungkinkan, lalu mendepak keluarga partai *Ahrar ad-Dustiyyin*.

Kehidupan politik Ali Abdur Raziq menjadi semakin kacau ketika pengganti Lord Allenby tidak hadir dalam tenggang waktu yang cukup panjang. *Ahrar ad-Dustiriyah* ibarat anak ayam kehilangan induk, sedang partai *al-ittihad* yang terdiri dari kaum penjilat dan reaksioner semakin mudah menyingkirkan, menindas dan mengisolasi keluarga Raziq dari pemerintah dan konstalasi politik. kesombongan menjadi-jadi dikalangan anggota partai penjilat raja.

Setelah terbitnya *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*, kehidupan politik *Ahrar ad-Dustiriyin* menjadi semakin tidak menentu. Bagaimana tidak, surat keputusan pemecatan Ali Abdur Raziq dari segala jabatan yang dipegangnya selama ini oleh Yahya Ibrahim Pasya selaku ketua partai *Al-ittihad* dikirim ke Abdul Aziz Fahmi Pasya, yang saat itu menjabat sebagai menteri peradilan merangkap ketua partai *Ahrar ad-Dustiriyin* dan masalah ini harus ditangani. Hal ini sudah barang tentu menjadi dilemma yang merumitkan. Secara pribadi ia punya kaitan erat dengan Ali Abdur Raziq sebagai anggota partai, namun dilain pihak ia adalah menteri peradilan yang dituntut untuk segera mengambil keputusan dengan adil.

Dibalik semua itu, sebenarnya ada keinginan pihak istana untuk membuang keluarga partai *Ahrar ad-Dustiriyin* dari parlemen, jalan yang

direncanakan itu tentu saja berhasil sebab Abdur Aziz Fahmi Pasya tidak akan mungkin menjatuhkan hukuman kepada Ali Abdur Raziq.

Akhirnya ketua partai itu dipecat dari dewan menteri pada tanggal 5 September 1925, diganti oleh Ali Mahi Pasya seorang anggota partai *ittihad* yang juga menjabat sebagai menteri pendidikan umum. Pemecatan ini diumumkan di dalam surat kabar *al-Ittihad*.⁸

Setelah kejadian ini maka seluruh menteri dan pejabat kerajaan yang berasal dan berhubungan dengan partai *Ahrar ad-Dustiriyyin* diberhentikan satu persatu secara paksa dan tanpa alasan yang tepat.

Menurut pendapat beliau, soal corak dan bentuk negara bukan urusan agama tetapi urusan duniawi dan diserahkan kepada manusia untuk menentukannya. Oleh karena itu tindakan Mustafa Kamal Attaturk dalam menghapuskan khilafah dari sistem kerajaan Usmani bukanlah suatu tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam.⁹

Masalah yang menjadi perhatian khusus Ali Abdur Raziq dan kehidupan politiknya adalah khilafah, apa yang menjadikan beliau memfokuskan kajiannya terhadap sistem ini adalah adanya tokoh-tokoh yang berusaha mempertahankan dan ada pula yang ingin menghapuskannya dari ajaran Islam, mengingat khalifah tidak lagi boleh berperan sebagaimana yang diharapkan. Khilafah tidak lagi menjadi idola sebab sudah hampir tidak ada perbedaan dengan kerajaan.

Pendapatnya yang liberal boleh dilihat dari pernyataannya bahwa dalam hidup bermasyarakat tiap kelompok manusia memerlukan penguasa yang

⁸ *I b i d*, hlm. 89

⁹ Harun Nasution, *Loc.Cit.*

mengatur dan melindungi kehidupan mereka, lepas dari agama maupun keyakinan apakah itu Islam, Yahudi, Nashrani ataupun tidak beragama sama sekali. Penguasa adalah pemerintahan, tapi tidaklah harus berbentuk khilafah, melainkan dapat beraneka ragam sifatnya, apakah konstitusional atau kekuasaan mutlak, republik maupun diktator. Tegasnya tiap bangsa harus mempunyai pemerintah, tetapi baik bentuk maupun sifatnya tidak harus satu khilafah dan boleh beraneka ragam.¹⁰

C. SEBUAH BUKU DAN PERMASALAHANNYA

Buku yang dikarang oleh Ali Abdur Raziq diberi judul *Al Islam wa Ushul al-Hukm* telah diterjemahkan dengan *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*. Maryam Jameelah menyebutnya dengan *Islam and the Principles of Government*. Buku ini lahir sebagai akibat adanya diferensial opini dari beberapa tokoh.

Penghapusan khilafah di Turki oleh Musthafa Kamal Attaturk, betapapun sangat mengejutkan dunia Islam, karena selama ini Istambul merupakan lambang bagi kekuatan politik dunia Islam dan dunia Timur. Al-Qur'an secara tegas memang tidak memberikan garis yang tegas dalam masalah khilafah.¹¹

Ali Abdur Raziq disebut sebagai orang alim pertama penentang khilafah¹². Ia berusaha menjelaskan kepada umat tentang penghapusan sistem ini melalui buku tersebut. Tanpa diduga sebelumnya, buku ini membawa kesan yang panjang

¹⁰ Munawir Sazali, *Op Cit.*, hlm. 141

¹¹ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta ; cet I, 1985, hlm. 83

¹² Maryam Jameelah, *Loc.Cit.*

dikalangan umat Islam, bahkan pada karirnya sendiri dan partai *Ahrar ad-Dusturriyin*.

Di dalam bukunya dinyatakan bahwa baik kepentingan agama maupun duniawi tidak memerlukan adanya khilafah. Ia membantah pendapat ulama dan politisi bahwa tegaknya syiar Islam serta kemaslahatan sangat tergantung pada adanya khilafah.

Bila dilihat dari segi politik, *Al-Islam wa al-Ushul al Hukm* mendukung terhapusnya sistem pemerintahan khilafah di Turki, sebagaimana halnya Attaturk yang menginginkan berdirinya republik dan mengangkat dirinya menjadi seorang presiden. Sedang dilihat dari segi agama penghapusan khilafah bertentangan dengan apa yang disepakati kaum muslimin karena akan menghancurkan asas-asas Syari'at *amaliyah* dan secara terang-terangan merupakan tantangan terhadap syariat Islam, serta pengingkaran terhadap hubungan antara khilafah dan Islam yang telah berlangsung sepanjang masa.¹³ setelah menerangkan Islam atas dasar dualisme (pemisahan antara agama dan negara), dan menyatakan misi Islam hanyalah dihati. Ali Abdur Raziq kembali menyatakan bahwa kita harus mengikuti ajaran Kristen untuk memahami Islam dalam konteks kenegaraan. Ia mengatakan: *berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi miliknya dan berilah kepada Allah apa yang menjadi miliknya*.¹⁴

Setelah menentang sistem khilafah, Ali Abdur Raziq memberikan jalan keluar agar umat Islam mengambil Sekularisme dan Nasionalisme. Syeikh Ali Abdur Raziq mengatakan berdasarkan asumsi bahwa bukan saja umat Islam harus

¹³ Maryam Jameelah, *Loc. Cit*

¹⁴ Dhiya' ad-Din Rais, *Op Cit.* , hal 72

mengambil sistem-sistem politik Eropa, akan tetapi Islam itu sendiri mutlak tidak ada hubungannya dengan negara.¹⁵

Di dalam buku yang ditulisnya beliau tidak meragukan sedikitpun bahwa yang menjadi pijakan khilafah itu selamanya adalah paksaan dan penekanan.¹⁶ Menurut analisis beliau dalam sejarah belum terukir adanya pemerintah seorang khalifah yang tidak dibarengi oleh paksaan-paksaan bersenjata dan kekuatan penekanan.¹⁶ Kasus yang ditampilkannya adalah pembai'atan khalifah Muawiyah bin Abi Sofyan dan Yazid bin Muawiyah.

Tidak diherankan lagi bila pendapat yang terlalu berani ini mendapat protes yang tajam dari kalangan tokoh kenegaraan dan ulama, biarpun ulama itu sebenarnya tidak perlu mencampuri urusan politik dan kenegaraan.

Fokus kedua yang menjadi masalah dalam bukunya adalah adanya pemisahan yang tegas antara agama dan dunia. Selain menyatakan hal itu beliau juga tidak mewajibkan *jihad fisabilillah*, sebab apa yang terjadi dalam sejarah jihad itu dilakukan tidak semata-mata untuk penyiaran agama tetapi sarana untuk mengukuhkan eksistensi kekuasaan dan ekspansi.¹⁷

Tuhan telah memerintahkan *amar ma'ruf nahi munkar* dan hal itu sudah pasti tidak sempurna kecuali dengan adanya kekuasaan dan pimpinan. Demikian juga halnya dengan perintah wajib, menegakkan keadilan, bermasyarakat dan menolong orang yang teraniaya.¹⁸

¹⁵ Maryam Jameelah, *Loc. Cit*

¹⁶ Ali Abdur Raziq, *Op Cit.*, hal 38

¹⁷ Ali Abdur Raziq, *Op Cit.*, hal 81

¹⁸ Ibnu Taymiyah, *Assiyasah as-Syar'iyah fi Islahir Raa'ie wa ar Ra'iyah*, penterj; firdaus A.N, (Jakarta; Bulan Bintang, cetakan III, 1977), hlm. 267

Karena buku yang dianggap berbahaya ini beliau dikutuk dan dikucilkan oleh majelis ulama Az-Azhar, diberhentikan dari jabatannya sebagai hakim dan dilarang menduduki jabatan dalam pemerintahan, hal ini diterima setelah sidang dihadapkan majlis besar para ulama. Syeikh Ali Abdur Raziq diajukan ke mahkamah dengan tuduhan melanggar pasal No. 101 tahun 1911. Undang-undang Universitas Al-Azhar No. 10 tahun 1911.

Majelis ulama yang terdiri dari 24 anggota ini menilai pendapat Ali Abdur Raziq bertentangan dengan Islam, alasan yang dikemukakan antara lain :

1. Ali Abdur Raziq menempatkan Islam semata-mata bersikap spiritual, tanpa ada kaitannya dengan pemerintahan dan kekuasaan eksekutif dalam urusan duniawi.
2. Dikatakannya bahwa jihad yang dilakukan Rasulullah itu adalah demi jabatan dan jajahan, bukan demi agama.
3. Dinyatakan pula bahwa misi Rasulullah itu hanya menyampaikan syariat tanpa ada hubungannya dengan pemerintah, kekuasaan dan eksekutif.
4. Pemerintah Abu bakar dan *Khulafaur Rasyidin* sesudahnya bukanlah pemerintahan agama.¹⁹

Isi dari pasal 101 undang-undang Al-Azhar No. 10 tahun 1911 adalah sebagai berikut : Apabila salah seorang ulama apapun jabatannya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik keulamaan, maka ia akan dijatuhi hukuman yang ditetapkan oleh pimpinan tertinggi al-Azhar (Syeikh Azhar) dengan persetujuan 19 orang ulama besar berupa pengucilan dari lingkungan para

¹⁹ H. Aqid Suminto, *Op Cit*, hlm. 84

ulama. Selanjutnya ia ditetapkan sebagai orang hukuman berdasarkan keputusan *jami'ah* Al-Azhar dan lembaga-lembaga pendidikan lain serta dipecat dari seluruh jabatan yang dipegangnya. Disamping itu ia dinyatakan kehilangan hak untuk memangku jabatan apapun yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan.

Persidangan terhadap Syeikh Ali Abdur Raziq akhirnya dilaksanakan tepat pada hari yang telah ditentukan 12 Agustus 1925 atau 22 Muharram 1344, dibawah pimpinan al Ustadz al-Akbat al-Syeikh Muhammad Abu Fadl, Syeikhul Azhar yang diikuti oleh 24 ulama besar lainnya.²⁰

Demikianlah akhir karir Ali Abdur Raziq sebagai seorang ulama dan hakim mahkamah syariah di Mesir. Kegagalannya adalah akibat dari *Al-Islam wa Ushul al-Hukm* dan keributannya yang tak dapat dielakkan, terutama sekali setelah beliau dijatuhi hukuman oleh sidang ulama Al-Azhar.

²⁰ Dhiya' ad Din ar Rais, *Op Cit*, hlm. 81

BAB III

KONSEP PEMERINTAHAN DALAM ISLAM

A. PANDANGAN UMUM

1. KHILAFAH DAN PEMERINTAHAN ISLAM

Urusan pemimpin untuk orang banyak adalah satu diantara kewajiban agama yang terbesar, bahkan agama tidak bisa tegak tanpa adanya pimpinan itu. Karena kemaslahatan umat tidak bisa sempurna kecuali dengan bermasyarakat, masing-masing pribadi saling membutuhkan dan masyarakat tidak bisa tidak harus mempunyai ketua.¹ Hadits Rasulullah menyebutkan:

Artinya; tidak bagi tiga orang yang berbeda ditengah padang pasir (perjalanan), kecuali mereka harus mengangkat salah seorang diantaranya untuk menjadi pemimpin mereka.²

Kandungan yang kita peroleh dari hadist ini adalah adanya keharusan untuk mengangkat seseorang menjadi pemimpin dan satu kelompok kecil dalam perjalanan. Sudah sepertinya hal itu menjadi perhatian bagi segala bentuk lembaga kemasyarakatan. Allah SWT telah memerintahkan *amar ma'ruf nahi munkar*, dan hal itu sudah pasti bisa sempurna dengan adanya kekuasaan politik.

Rasulullah sebagai seorang pembawa risalah Islam telah mencontohkan kepada umat betapa perlunya pemerintahan, dan beliau telah mendirikan secara sederhana perangkat-perangkat pemerintahan, belum

¹ Ibnu Taimiyah, *Loc Cit.*

² *I b i d*, hlm. 267 (hadits dari Abdullah bin Umar)

dikenal sistem pemerintahan dan perwakilan serta belum ada kaidah-kaidah permusyawaratan.

Inilah hal-hal yang masih dipertanyakan oleh syeikh Ali Abdur Raziq,³ yang ingin diketahuinya adalah apa yang menjadi penyebab terjadinya keraguan, kontroversial dan ketidaklengkapan syariat, bagaimana pula proses pembentukan negara, corak dan sistemnya ?

Dalam pandangan ulama kewajiban mendirikan pemerintahan telah tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis. meskipun tidak adanya perintah tegas dalam Al Qur'an tentang wajibnya mendirikan pemerintahan, didalamnya hanya ada etika yang bisa dianut dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Akan tetapi setelah rasul wafat terjadi ijma ulama untuk melanjutkan kepemimpinan beliau.

Pada level kenegaraan ijma masyarakat yang merupakan perpaduan ijtihad individu (kelompok kerja) dirumuskan dalam bentuk hukum oleh lembaga legislatif (*syuro ijma*). Dasar perlembagaan ini telah tampak pada praktek kesejahteraan Islam awal.⁴

Khalifah merupakan kepemimpinan umum bagi kaum muslimin didunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat dan memikul dakwah Islam keseluruhan dunia. Kekhilafahan dalam suatu negara hanyalah milik orang-orang beriman (kaum muslim) tapi dapat dinikmati oleh seluruh umat dan tidak dibatasi oleh kelompok atau keturunan manapun.⁵

³ Ali Abdur Raziq, *Op Cit*, hlm. 88

⁴ Taufik Adnan amal, *Op Cit*, hlm. 82

⁵ Abdul A'la Al Mahmudi, *The Islamic Law and Constitution*, penterj. Asep Hikmat, (Lahore ; Pakistan; Islamic Publication ltd, edisi V, 1975), hlm. 196

Pemerintahan dalam Islam boleh dipegang oleh siapapun yang kuasa dan mencakupi syarat untuk menjadi pemimpin atau kepala Negara. Tampaknya para ulama punya kesamaan visi walaupun ada perbedaan disana sini. Sedangkan tentang syarat harus keturunan Quraisy tidaklah dipandang sebagai suatu keharusan oleh pemikir Sunni modern atas dasar bahwa Nabi tidak pernah menetapkan siapapun sebagai penggantinya.

Prinsip dasar khilafah adalah hendaknya dipulangkan kepada pemilih *Ahlal Halli wa al-Aqdi* (kaum cerdik pandai)⁶, atau penunjukan oleh Imam yang masih memerintah,⁷ dan selanjutnya di bai'at oleh seluruh umat Islam.

Sistem pemerintahan modern khilafah telah dimulai sejak diangkatnya sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah pertama bagi dunia Islam beberapa saat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan dengan khalifah-khalifah yang lain sampai dengan Ali bin Abi Thalib. Masa inilah yang dikenal dengan *Khulafa al Rasyidin*. Kemudian dilanjutkan dengan bani Umayyah dan Abbasiyah. Demikianlah sejarah kekhalifahan dalam Islam berjalan terus sampai akhirnya dipusatkan di Turki. Namun akhirnya pada tahun 1924 Musthafa Kamal Attaturk menghapuskannya dan mengakibatkan umat Islam menjadi gusar.

Setelah berakhirnya sistem khilafah di Turkey, dunia Islam mulai ramai membicarakan konsep negara Islam.⁸ pembicaraan tentang konsep negara Islam di dunia Islam sendiri merupakan satu fenomena relatif. Selama masa

⁶ Ali Abdur Raziq, *Op Cit*, hlm. 36

⁷ Ahmad Syafei Ma'rif, *Lot. Cit.*

⁸ Salim Azzam, *Op Cit*, hlm. 7

penjajahan, pembicaraan mengenai hal ini praktis tidak pernah terdengar karena terpisahnya kaum muslimin dari ajaran Islam. Walau demikian, masyarakat Islam selalu melahirkan tokoh-tokoh intelektual dan ulama yang membawa cahaya ditengah kegelapan umat. Mereka menunjukkan arah yang seharusnya mesti ditempuh oleh umat sesuai dengan ajaran Islam. Usaha yang dijalankan untuk membangkitkan kembali khilafah dilahirkan oleh Jamaluddin Al Afghani, Muhammad Abduh, dan lain-lain. Rasyid Ridha mengumpulkan ide-ide tentang perlunya khilafah dalam buku *Al-Khilafah wa al-Imamah al-Uzma*.

Sistem pemerintahan khilafah yang telah dimulai sejak wafatnya Rasulullah Saw mengalami perkembangan yang cepat dengan model yang semakin rapi. Meskipun pada dinasti Umayyah dan Abbasiyyah khilafah telah menyimpang jauh menjadi kekuasaan turun temurun, namun sekurang-kurangnya khilafah dapat menjadi alat pemersatu, dengan adanya seorang khilafah yang berdaulat. Ali Abdur Raziq mendukung penghapusan sistem pemerintah khilafah oleh Mustafha Kamal Attaturk dengan alasan yang sangat kontroversial, yakni beliau tidak meragukan sedikitpun bahwa yang menjadi pijakan kekhalifahan adalah paksaan dan penekanan. Disamping itu umat diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan sistem pemerintahan yang akan dianut, asalkan tidak lari dari ketentuan agama, karena Al Qur'an telah memberikan batasannya.

Khalifah sama sekali bukan ajaran agama, ia hanya merupakan sistem politik murni dan tidak ada hubungannya dengan agama. Agama tidak memerintah (mengharuskan) dan tidak juga melarangnya. Hal ini terserah kepada pertimbangan akal, pengalaman bangsa-bangsa dan konstitusi politik. Perencanaan militer Islam, pembangunan kota dan lain-lain tidak ada hubungannya sama sekali dengan agama.⁹

Tentang pemilihan bentuk dan sifat negara diserahkan kepada akal manusia untuk menentukannya, yang terpenting disini adalah kaedah-kaedah yang dianut harus sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Al Qur'an.

Jika dengan cermat kita mempelajari konvensi para khalifah untuk memperoleh pedoman mengenai bentuk dan jenis pemerintahan, maka hanya Amirlah yang berhak menerima kepatuhan dan kesetiaan sepenuhnya dari rakyat, bahwa rakyat menyerahkan sepenuhnya hak mereka untuk mengambil keputusan mengenai semua masalah yang berkaitan dengan hajat hidup manusia.¹⁰

Bentuk dan jenis pemerintahan dapat diidentifikasi dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Namun menurut kebanyakan ulama sistem khilafahlah yang sepenuhnya sesuai dengan ideologi Islam. Bentuk pemerintahan ini akan dapat tercapai jika masyarakatnya telah dapat dikembangkan sesuai dengan ajaran Islam. Manusia mempunyai hak untuk memilih bentuk dan jenis negara sesuai dengan kemampuan akalnya.

⁹ Muhammad Al Bahiy, *Op Cit*, hlm. 163

¹⁰ Abdul A'la Al Maududi, *Op Cit*, hlm. 264

Pemerintahan dalam Islam sama sekali tidak ada kaitannya dengan bentuk pemerintahan yang sekarang, misalnya ia bukan tirani yang kepala negaranya senantiasa bertindak sewenang-wenang, mengambil nyawa dan harta sekehendak hatinya, membunuh yang ingin dibunuh dan sebagainya. Begitu juga bukan pemerintahan absolut, akan tetapi pemerintahan konstitusional dalam arti bahwa penguasa tunduk pada serangkaian persyaratan dalam pemerintahan yang mengatur negara. Karena itu pemerintahan Islam dapat disebut sebagai pemerintahan hukum Allah atas manusia.

Perbedaan pokok antara pemerintahan Islam dengan monarki konstitusional adalah apabila wakil-wakil rakyat atau raja dalam pemerintahan tersebut hanya kekuasaan membuat hukum, dalam Islam kekuasaan legislatif dan hak membuat hukum hanya ada ditangan Allah. Karena itu dalam Islam majelis perencanaan mengambil alih majelis legislatif yang merupakan salah satu dari ketiga kekuasaan pemerintah. Majelis ini menyusun program untuk berbagai kementrian berdasarkan ajaran Islam dan menentukan bentuk pelayanan pemerintahan diseluruh negeri.¹¹

Demokrasi dalam Islam memberikan hak kepada rakyat untuk mengkritik, menegur dan membetulkan pemerintahan yang salah dan zalim. Kalau tidak cukup dengan kritik dan teguran, Islam memberikan hak kepada

¹¹ Slim Azzam, *Op Cit.* , hlm. 128

rakyat untuk menghilangkan kezaliman itu dengan kekuatan dan kekuasaan jika perlu.¹²

Urusan kenegaraan pada dasarnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Islam, yang menjadi tujuan ialah kesempurnaan berlakunya undang-undang Allah,. Baik yang berkenaan dengan kehidupan dunia ataupun yang berkenaan dengan kehidupan yang kekal di alam baka.¹³

Yang dibawa oleh Rasulullah adalah patokan untuk mengatur negara supaya negara itu menjadi kuat, dan bisa menjadi wasilah yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan hidup manusia yang terhimpun dalam negara. Dalam pada itu menjadi khalifah atau tidak bukanlah urusan utama. jabatan khalifah bukan menjadi syarat yang wajib dalam pemerintahan Islam. Apa yang penting adalah seseorang yang menjadi kepala negara diberi kekuasaan sebagai Ulil Amri kaum muslimin, sanggup bertindak dan menjalankan peraturan Islam dengan semestinya dalam susunan kenegaraan, baik dalam kaedah maupun praktek.

Kewajiban mengadakan pemerintahan adalah karena dengan pemerintahan itu manusia bisa mengabdikan kepada Allah Swt, karena pengabdian dengan pimpinan itu adalah merupakan suatu pendekatan diri kepada Allah yang paling baik, rusak binasanya urusan adalah karena pimpinan itu telah dijadikan sebagai alat untuk mencari kedudukan dan harta benda.

¹² Muhammad Natsir, *Capita Selecta*, Jakarta ; Bulan Bintang, cetakan III, 1973), hlm.

perkembangan zaman. Mungkin negara ini cocok dan sangat tepat dengan seperempat abad yang lalu, tapi perlahan-lahan pasti menjadi usang (*out of date*) dan tidak lagi memiliki *ability to cope* (kemampuan menanggulangi masalah modern) sesuai dengan dinamika sejarah yang terus mengalami perubahan dan pertumbuhan sesuai dengan sunnatullah.

Akan tetapi dengan menyebutkan hal diatas tidak berarti sama sekali kita diperkenankan mendirikan negara sesuai dengan kemampuan manusiawi dan terlepas dari ajaran Islam. Membangun agama yang terlepas dari dasar Islam sama halnya dengan mendirikan negara sekularitis, yang kehilangan dimensi spritual dan menjurus pada kehidupan serba materi sehingga petunjuk wahyu hanya disebut dalam kesempatan berkala.

Asas fundamental yang harus ditegakkan umat dalam membangun suatu negara Islam ada tiga, yaitu :

a. *Al-Adalah*

Keadilan yang seluas-luasnya menyangkut aspek hukum, sosial dan ekonomi juga *equality of opportunity*.¹⁴

b. *Syura* (Musyawarah)

Menjamin negara dan masyarakat agar tidak hanyut kearah kultus individu dan sistem pemerintahan Fir'aun. Dalam Al-Qur'an kita jumpai lebih dari 70 ayat yang menyangkut Fir'aun dan kehidupannya. Islam menunjukkan institusi penting untuk melawan setiap *pharaoh like regim* dengan musyawarah.¹⁵

¹⁴ Salim Azzam, *Op Cit*, hlm. 32

¹⁵ *I b i d*, hlm. 34

c. *Al-Ikwanul Muslimin*

Maka dalam Islam tidak dikenal diskriminasi dan *segresi* (pengelompokan), serta perbedaan jenis kelamin. Persaudaraan Islam ini tidak hanya berdasarkan persamaan agama tapi juga persaudaraan diantara sesama manusia.¹⁶

Yang perlu di ingat adalah tujuan suatu negara di dalam ajaran Islam sudah jelas jika mau meneliti Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Abdul A'la Al-Maududi menerangkan beberapa tujuan diselenggarakannya negara, antara lain :

1. Untuk mengelakkan terjadinya eksploitasi antara manusia, antar kelompok dan kelas-kelas dalam masyarakat.
2. Memelihara kebebasan ekonomi, politik, pendidikan dan agama para warga negara dan melindungi seluruh warga negara dari invasi asing.
3. Untuk menegakkan sistem keadilan sosial yang seimbang sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an.
4. Memberantas setiap kejahatan dan mendorong setiap kebajikan yang dengan tegas telah digariskan dalam Al Qur'an
5. Menjadikan negara sebagai tempat tinggal yang teduh dan mengayomi setiap warga negara dengan jalan memberlakukan hukum tanpa diskriminasi (perbedaan segala aspek).¹⁷

Untuk mengangkat seorang pemimpin negara Islam perlu dilihat dan diseleksi dengan sebaik-baiknya. Selain syarat-syarat di atas maka perlu juga

¹⁶ *I b i d*, hlm.35

¹⁷ Abdul a'la Al-mahmudi, *Khilafah wa Al Mulk*, *Op Cit*, hlm. 31

ditelaah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin umat, diantaranya:

- a. Percaya dan menerima dengan baik prinsip-prinsip tanggung jawab pelaksanaan tatanan khilafah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- b. Tidak boleh terdiri dari orang-orang zalim, fasik, orang yang selalu melakukan dosa dan orang yang melanggar batasan Allah, mereka hendaklah terdiri dari orang-orang mukmin yang bertaqwa dan beramal saleh. Apabila orang zalim dan fasik berkuasa dan merebut kepemimpinan maka menurut pandangan Islam kepemimpinan itu batal.
- c. Berilmu, berakal sehat dan memiliki kecerdasan serta kearifan, kemampuan intelektual dan fisik untuk memutar roda pemerintahan dan memikul tanggung jawab.
- d. Harulah orang-orang yang beramanat sehingga dapat dipikul tanggung jawab kepada mereka dengan aman tanpa keraguan.

Di dalam Islam terdapat sistem-sistem yang harus dianut oleh negara yang menyatakan dirinya sebagai negara Islam, dan hal ini diakui oleh semua aliran baik Sunni maupun Syi'ah. Keputusan ini merupakan hasil konverensi di Karachi tanggal 21 s/d 24 Januari 1951.

Konstitusi pemerintahan Islam harus meliputi prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1. Kekuasaan tertinggi atas segenap alam semesta dan semua hukum terletak hanya pada Allah, Tuhan semesta alam. Kekuasaan manusia hanyalah terbatas, dan bagaimanapun tidak akan dapat menandingi kekuasaan Allah.

2. Hukum di muka bumi haruslah berdasarkan Al Qur'an dan as Sunnah, sehingga ketetapan hukum atau administratif yang akan dikeluarkan dan diberlakukan tidak boleh melanggar Al Qur'an dan as Sunnah.¹⁸

3. *Amar ma'ruf nahi Munkar*

Negara yang ditegakkan hendaknya mampu memerintahkan kebenaran sesuai dengan hukum Islam dan melarang kemungkaran sesuai dengan tuntutan Islam.

4. Memperkuat ikatan persatuan dan persaudaraan diantara kaum muslimin sedunia, mencoba semaksimal mungkin untuk menghalangi timbulnya prasangka yang bersumber dari perbedaan ras, wilayah ataupun pandangan materialistik. Persatuan dan kesatuan diikat atas dasar *dienul Islam*.

5. Terjaminnya keperluan dasar kehidupan. Didalam negara tersedia keperluan dasar rakyat sehingga akan terasa ketenangan dan ketentraman hidup di dalamnya.

Akhir dari ini semua adalah bahwa Islam telah memberikan haluan yang harus dianut oleh umat Islam didalam menjalankan pemerintahan, tentang bentuk negara sebenarnya juga telah dibentangkan beberapa alternatif yang baik. Umat boleh memilih mana bentuk negara terbaik yang akan dianut oleh negaranya. Segalanya tergantung cara untuk mengemudikan teraju kepemimpinan, jika diambil bentuk yang keliru maka sudah barang tentu hasil yang dicapai juga akan jauh dari apa yang diharapkan. Firman Allah

¹⁸ Salim Azzam, *Op Cit*, hlm. 159

yang mafhumnya” *Sesungguhnya Allah tidak akan berubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu merubah nasibnya sendiri*”.

2. SISTEM PEMERINTAHAN KHILAFAH DALAM SEJARAH

Sistem pemerintahan khilafah telah dimulai sejak Nabi Muhammad saw diangkat menjadi pemimpin umat meski secara resmi belum ada, namun praktek pelaksanaannya telah ada dimasa itu. Umat Islam memulai hidup bernegara sejak dan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Disinilah lahirnya buat pertama kali suatu komunitas Islam yang bebas dan merdeka dibawah pimpinan Nabi.

Tidak lama setelah Nabi menetap di Madinah, beliau mendeklarasikan suatu piagam yang mengatur kehidupan dan hubungan antar komunitas yang menghubungkan komponen-komponen masyarakat mejemuk di Madinah. Piagam ini dikenal dengan piagam Madinah.¹⁹

Nabi Muhammad SAW telah menandatangani piagam tersebut pada tahun I Hijriyah (622 M) sebagai tanda lahirnya negara Islam, Montgomery Watt menyebutnya sebagai konstitusi Madinah.²⁰

Didalam bukunya *Mohammadanism* ²¹ H.A.R Gibb Menyebutkan sebagai *Legislative Enactment*, dikatakannya ;

At Madina all this change. The existence of the new community called for promulgation of many ruler of law and social order as will as for the

¹⁹ Munawir Sazali, *Op Cit.* hlm. 10

²⁰ Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad SAW* (Jakarta ; Bulan Bintang, cet. I, 1973), hlm. 6

²¹ *I b i d*, Mengutip H.A.R.Gibb dalam bukunya *Muhammadanism*, hlm. 57. Di dalam buku ini didapati keterangan bahwa Islam adalah buatan Nabi Muhammad sehingga pengikut Islam dikenal sebagai *Muhammadanism*.

expansion of his ethical teaching, but legislative enactment. The document in which he laid down the socio political basic of the joint Madinian community, is not to be found at the Koran at all. That it was promulgated not as a revolution but on his own initiative through some light on the distinction which he himself drew between reviliation and personal action.

Di Madinah Nabi Muhammad saw adalah segala-galanya, beliau adalah rasul dengan otoritas berlandaskan ke-Nabian sekaligus pemimpin masyarakat dan kepala negara. Di dalam menjalankan pemerintahan dan bertindak, rasul mendapat petunjuk langsung dari Allah SWT berupa ayat yang diturunkan kepadanya.

Firman Allah Swt dalam surat An-Najm 3-4:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Artinya: “Dan tidaklah yang diucapkan itu (Al Qur’an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang disampaikan kepadanya”.

Pola yang sempurna tentang kehidupan bernegara belum kita temukan dalam kehidupan Rasulullah SAW, pola yang kita temukan masih sederhana berlandaskan ajaran yang telah digariskan di dalam Al Qur’an. Ajaran tentang pemerintahan yang telah dipraktekkan di zaman Rasulullah adalah sebagai berikut;

1. Permusyawaratan

Pelaksanaan hukum dalam pengertian pemerintahan sudah ada di zaman Rasulullah SAW sebagaimana yang terdapat pada suku bangsa pra Islam. Berbagai kasus diajukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk

diselesaikan persoalannya.²² salah satu hal yang patut dikaji dari periode Nabi adalah mekanisme pengambilan keputusan atas persoalan yang dihadapi.

Sesuai dengan petunjuk Al Qur'an, Nabi mengembangkan budaya musyawarah dikalangan para sahabatnya. Beliau sendiri meskipun seorang rasul, amat gemar berkonsultasi dengan para pengikutnya dalam soal-soal kemasyarakatan. Dalam berkonsultasi beliau tidak hanya mengikuti satu pola saja, tetapi meminta pertimbangan orang-orang yang ahli dalam hal yang dipersoalkan. Kadang kala beliau tidak terpaku pada pendapat satu orang sahabat saja, namun menerima pendapat yang lainnya. Dan beliau selalu mendapat petunjuk Allah melalui perantaraan wahyu yang dibenarkan para sahabat.²³ Ada beberapa contoh kejadian yang dapat kita jadikan contoh bagaimana Nabi meletakkan posisi musyawarah pada masa pemerintahannya, misalnya posisi dalam membuat kubu pertahanan pada perang Badar, perjanjian Hudaibiyah, masalah tawanan perang Badar, perlakuannya terhadap jenazah Abdullah bin Salul dan kejadian lainnya.

Sistem pemerintahannya adalah asas kedua bagi suatu negara yang menentang elitisme, yakni faham bahwa hanya pemimpin (kaum elit) saja yang paling tahu dalam mengurus dan mengelola negara, sedangkan rakyat adalah domba-domba yang akan mengikuti kehendak kaum elit.²⁴

Rasulullah saw bersabda yang artinya;

“Anda sekalian mengajukan persoalan yang anda perselisihan kepada saya agar saya menetapkan hukumnya, hanya saja barangkali ada

²² Ali Abdur Raziq, *Op Cit*, hlm. 62

²³ Munawir Sazali, *Op Cit*, hlm. 17

²⁴ Salim Azzam, *Op Cit*, hlm. 31

*diantara anda yang memiliki argumentasi yang baik. Barang siapa yang merebut hak saudaranya (yang menjadi lawan dalam perkara itu) sesudah saya putuskan perkaranya, maka itu sama saja artinya dengan mengambil potongan api neraka. Oleh karena itu jangan sekali-kali kamu mengambil hak saudara kamu”.*²⁵

Sistem musyawarah dalam Al Qur'an telah digariskan secara jelas, disebutkan bahwa apabila kita berselisih tentang suatu masalah, maka kita harus segera merujuknya kepada dua warisan Rasulullah. Tentang cara musyawarah, dengan bijaksana diserahkan kepada pertimbangan kaum muslimin. Islam tidak memberikan suatu bentuk tertentu bagi lembaga permusyawaratan, karena suatu alasan sederhana, yaitu bahwa Islam adalah agama yang universal secara fleksibel. Karena itu bukanlah menjadi suatu keperluan yang mendesak untuk menetapkan bahwa umat harus memberikan pendapatnya secara langsung maupun melalui wakil yang duduk dilembaga perwakilan rakyat dan dipercayai sepenuhnya untuk menyalurkan aspirasi rakyat, apakah wakil itu harus dipilih melalui pemilihan umum atau melalui badan pilih, apakah lembaga permusyawaratan tersebut harus terdiri dari satu atau dua dewan dan sebagainya. Jelas sekali jika masalah itu menyangkut detail yang berbeda maka harus menurut perbedaan masyarakat dan kondisi yang dihadapi. Inilah alasan mengapa syariat membiarkan masalah ini terbuka untuk dipecahkan sesuai dengan kebutuhan waktu.

2. Perwakilan

Sistem pelimpahan kekuasaan dan perwakilan telah ada dalam pemerintahan Islam. Ajaran untuk memberikan urusan kepada yang lebih ahli

²⁵ Lihat *Shahih Bukhori*, jilid IV, hlm. 241

telah tercantum dalam Al Qur'an sebagaimana telah tertulis dalam kisah Yusuf yang meminta jabatan sebagai bendahara negara karena ia merasa mampu untuk memegangnya.

Didalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa dizaman Rasulullah SAW, beliau menyerahkan kekuasaan kepada para sahabat untuk memecahkan permasalahan dan membantunya dalam menjalankan tugas.

Ada tiga orang sahabat yang disebut-sebut oleh jumhur ulama sebagai orang yang pernah diberi kekuasaan untuk menetapkan hukum disaat Rasulullah masih hidup. Diantara para ulama mengatakan Rasulullah telah melimpahkan kekuasaan untuk menetapkan hukum kepada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan Mu'az bin Jabbal.

Ajaran Al Qur'an yang berkaitan dengan pemerintahan sedang dilaksanakan oleh Rasulullah dalam praktek amaliyahnya. Beliau telah memilih masyarakat Islam yaitu masyarakat yang lahir dengan munculnya Islam sebagai bentuk negara yang bertumpu atas dasar ajaran-ajaran politis ini. Adapun ciri khas yang membedakan sistem negara ini dengan yang lainnya adalah :

1. Kekuasaan perundang-undangan Ilahi²⁶

Dasar yang amat utama dalam negara ini ialah *a Hakimiyah* (kekuasaan legislatif dan kekuasaan hukum tertinggi ada ditangan Allah SWT). Bahwa pemerintahan kaum muslimin pada hakekatnya adalah perwakilan,

²⁶ Abdul A'la Al Mahmududi, *Op Cit.* hlm. 93

sehingga pemerintahan tidak terlepas dari ajaran Islam dan Al Qur'an maupun As Sunnah.

2. Keadilan antara manusia²⁷

Seluruh rakyat memiliki persamaan hak dihadapan undang-undang Allah yang harus dilaksanakan keatas mereka semua, sebab dalam Islam tidak dibenarkan adanya sistem koneksi atau kesukuan.

3. Persamaan antara kaum muslimin²⁸

Ajaran Al Qur'an dalam surat Al-Hujarat ayat 10 dan 13 berlaku dalam tuntutan kehidupan bernegara. Perbedaan ras dan golongan tidak mengakibatkan dibedakannya hak pilih rakyat atau prioritas atas hak dan kedudukan.

4. Tanggung jawab pemerintahan²⁹

Pemerintahan, kekayaan serta kekuasaan adalah rahmat Allah, oleh karena itu pertanggung-jawabannya harus diserahkan kepada kaum muslimin yang takut kepada Allah dan benar-benar beriman. Kekuasaan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan.³⁰

5. Dasar kelima dari negara Islam adalah keharusan bagi para pemimpin negara dan pejabat-pejabat untuk bermusyawarah dengan kaum muslimin

²⁷ *I b i d.*, hlm. 94

²⁸ *I b i d.*, hlm. 96

²⁹ *I b i d.*, hlm. 97

³⁰ *I b i d.*, hlm. 97

dan mencari keridhaan mereka, mengikuti pendapat mereka serta melaksanakan sistem pemerintahan dengan cara bermusyawarah.

6. Ketaatan dalam hal kebijakan³¹

Makna dasar dari kaedah ini adalah bahwa perintah yang dikeluarkan oleh suatu pemerintahan atau penguasa kepada rakyat harus ditaati, apabila tidak sesuai dengan undang-undang syariat, maka haram bagi rakyat untuk mentaatinya.

Demikianlah diantara dasar-dasar pemerintahan dalam Islam yang telah diterangkan oleh Al Qur'an, selain beberapa dasar lagi seperti *Amar ma'ruf nahi munkar* dan larangan untuk berusaha mencapai dan mencari kekuasaan untuk kepuasan diri sendiri.

Sepeninggal Rasulullah tak ada seorangpun *ahli waris* pemerintahan, karena memang tidak ditunjuk profil pengganti beliau, namun umat pada waktu itu tahu apa yang harus dilakukan. Secara sportif mereka memilih seorang penguasa yang akan memimpin mereka kearah kejayaan dan tanpa menonjolkan potensi masing-masing untuk berambisi menduduki jabatan tersebut. Umat mengadakan musyawarah untuk mengangkat seorang khalifah. Kesepakatan diambil untuk menonjolkan sosok-sosok yang akan memimpin dan umat menamainya dengan *Khulafa al Rasyidin* (khalifah-khalifah yang adil dan benar). Ini adalah kata-kata yang mengandung makna *dalam* dan menjelaskan pentingnya tatacara yang benar bagi penggantian kedudukan Rasulullah menurut pandangan kaum muslimin.

³¹ *Ibid*, hlm. 100

Pada prinsipnya pengangkatan khalifah melalui cara pemilihan dan musyawarah mengalami perkembangan dan penyesuaian dibandingkan dengan apa yang ada dimasa Rasulullah. Pemilihan Abu Bakar berbeda dengan pemilihan Umar bin Khattab, demikian juga dengan pemilihan Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ketaatan yang paling dalam terhadap seorang khalifah terkandung dalam kata-kata *sami'na wa atha'na*. Perkataan ini selalu keluar dari mulut rakyat ketika terjadi pemilihan dan pembaiatan terhadap seorang khalifah.

Sesaat sebelum sayyidina Umar wafat, beliau mengangkat suatu panitia pemilihan agar ia dapat memutuskan pilihan khalifah, ia berkata: *Barang siapa menyeru kepada kepemimpinan bagi dirinya tanpa bermusyawarah dengan kaum muslimin maka bunuhlah ia*. Kemudian khusus kepada putranya sendiri ia mengatakan bahwa jabatan khalifah tidaklah untuk diwariskan. Beliau telah memilih sebanyak 6 orang dalam pemilihan itu menurut pandangannya adalah orang-orang yang paling besar pengaruhnya dan paling dapat diterima oleh masyarakat. Demikianlah selanjutnya hingga berakhirnya masa pemerintahan khilafah dari *Khulafa al Rasyidin*.

Pemerintahan dizaman *Khulafa al Rasyidin* sangat utuh karena menganut ajaran Islam yang murni tanpa satupun ciri kerajaan yang melekat didalamnya. Prinsip yang dianutnya tidak berbeda dengan apa yang ada dizaman Rasulullah SAW, hanya saja berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Ada beberapa hal yang menjadi catatan khusus didalam pemerintahan *Khulafa al Rasyidin*, yaitu:

- a. Pemerintahan berdasarkan musyawarah

Musyawarah pada hakekatnya adalah mengemukakan pendapat. Dapat dilihat bagaimana para khalifah mengangkat derajat dan nilai musyawarah setinggi-tingginya, seperti apa yang terjadi dimasa khalifah Umar.

Prinsip musyawarah untuk mufakat benar-benar dipegang oleh para khalifah, dan kebebasan mengemukakan pendapat benar-benar terealisasi dalam kehidupan bernegara.

b. Memberi kebebasan umat manusia dalam mentaati hukum.³²

Yang menjadi tolak ukur untuk menilai pemerintahan khalifah ini tergantung pada sejauh mana pengaplikasiannya dalam hidup dan sejauh mana penghormatannya pada kitabullah yang diimani oleh umat dan diterima sebagai undang-undang kehidupan. Keempat khalifah hanya berusaha mengikuti langkah yang telah diwariskan dan diwajibkan. Ia melakukan apa yang menurut keyakinannya dilakukan oleh Rasulullah sewaktu masih hidup.

Pada hakekatnya *Khalifah al Rasyidin* bukan merupakan suatu pemerintahan politik, tapi perwakilan sempurna dari *nubuwwah* yang tugasnya bukan hanya menjalankan tatanan negara, serta menjaga keamanan dan membela batas-batas negara saja, akan tetapi juga sebagai *mursyid* (guru pendidik).³³

Ditetapkan bahwa seorang kepala negara itu wajib bermusyawarah dengan orang-orang yang patut dan layak dibawanya bermusyawarah dalam urusan umat, yakni dalam hal yang belum dimusyawarahkannya lebih dulu, akan tetapi bukan masalah hukum yang telah ada kaitannya dengan agama.³⁴

³² *I b i d* , hlm. 16

³³ *I b i d* , hlm. 135

³⁴ Muhammad Natsir, *Op Cit*, hlm. 448

Apakah permusyawaratan itu sebagai yang telah dilakukan oleh abu Bakar beserta amir-amirnya di padang pasir di bawah pohon kurma, atau yang diatur dengan parlementer sebagaimana yang ada di abad XX ini. Atau akan dipakai suara langsung dari rakyat. Keduanya tidak ditetapkan secara pasti di dalam Islam. Hal ini diserahkan secara leluasa kepada ijtihad kita sendiri mana yang cocok untuk zaman modern.

Penerapan musyawarah hanya merujuk pada situasi dan kondisi yang ada pada saat tertentu, dan dengan jujur berupaya memahami prinsip dan rincian prinsip tersebut, sebagaimana telah ditafsirkan didalam situasi dan kondisi pada saat itu.³⁵ Orang-orang yang memegang peranan penting dalam permusyawaratan ini adalah *Ahl Halli wa al Aqdi*.³⁶

Majelis permusyawaratan terdiri dari orang-orang yang mewakili rakyat dalam hal pendapat, agar mereka menjadi penasehat khalifah, anggota majelis permusyawaratan harus dipilih dan tidak boleh ditunjuk (ditentukan).³⁷

Apabila musyawarah telah dilakukan diantara mereka, ternyata sebagian besar menghendaki supaya mengikuti kepada petunjuk kitab dan sunnah rasul atau ijma' kaum muslimin, maka wajiblah mengikuti jalan itu. Dan tidak seorangpun yang diperbolehkan menyalahi pendapat yang demikian walaupun ia seorang pembesar dalam lapangan agama dan duniawi.³⁸

Konvensi para khalifah dan putusan-putusan para fuqaha kenamaan yang akhirnya membimbing kita pada kesimpulan bahwa tanggung jawab *de*

³⁵ Abu A'la Al Maududi, *Sistem Politik Islam*, *Op Cit*, hlm. 259

³⁶ *I b i d*, hlm. 262

³⁷ Samih Atthif az-Zain, *Op Cit*, hlm. 21

³⁸ Syeikh Ibnu Thaimiyah, *Op Cit*, hlm. 262

facto atas seluruh masalah pemerintahan terletak di tangan kepala negara. Kepala negara meskipun diharuskan bekonsultasi dengan badan legislatif, namun ia tidak diwajibkan untuk mengikuti atau menyetujui kesepakatan dan putusan pandangan mayoritas, ia dapat menggunakan hak vetonya.³⁹

c. *Amanat Baitul Maal*

Para khalifah yang empat menganggap bahwa *baitul maal* adalah amanat Allah dan kaum muslimin, oleh karena itu apa yang dimasukkan ke dalamnya tidak boleh berasal dari sumber yang bertentangan dengan jalan Allah. Begitu juga dengan pengeluarannya tidak boleh bertentangan dengan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Para khalifah tidak pernah menggunakan *baitul mal* untuk memperkaya diri dan mencapai tujuan pribadi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya para khalifah tetap menggeluti bidang kerjanya seperti sebelum menjabat kedudukan tertinggi itu. Abu Bakar contohnya, beliau tetap berdagang dan menjajakan bahan pakaian. Begitu juga dengan *Amirul Mukminin* Sayyidina Umar bin Khatab yang hanya mencukupkan diri dengan harta dari *baitul maal*, setelah tidak dapat berdagang lagi karena kesibukan dalam menjalankan urusan pemerintahan.

Begitulah, meskipun para khalifah adalah orang yang berkuasa namun mereka tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk mengambil apa yang pantas diterimanya. Pengekangan diri khalifah meskipun sangat berkuasa, namun mereka tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk mengambil apa yang tidak pantas diterimanya.

³⁹ Taufik Adnan Amal, *Op Cit*, hlm. 62

Pengekangan diri khalifah tercermin dari perkataan Sayyidina Umar bin Khattab;

*Seorang khalifah tidak mengambil sesuatu kecuali dengan cara yang benar dan tidak meletakkan kecuali dalam tempat yang benar. Adapun seorang raja, dia bertindak sewenang-wenang dari yang ini dan memberi kepada yang ini.*⁴⁰

Hal ini diperhatikan benar oleh para khalifah, kita lihat hak bayi yang masih menyusuipun masih sangat diperhatikan dan tetap dikeluarkan. Demikian juga dengan gaji para tentara serta para pegawai yang mengabdikan pada negara, sehingga *baitul maal* benar-benar berfungsi dengan baik.

d. Pemerintahan tanpa fanatisme

Di dalam menjalankan tugas pemerintahan, seorang khalifah tidak selayaknya menganut paham kesukuan ataupun memandang *background* etnisnya. Apabila penguasa beragama Islam maka ia harus tetap memperhatikan seluruh rakyatnya yang muslim serta kafir *dzimmi*, jaminan kehidupan terhadap keduanya sama-sama diberikan.

Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi semua warga negara tanpa membedakan kasta dan keyakinan sangat ditekankan dalam Islam.⁴¹ Dalam sejarah pernah diterangkan bahwa pada sekali waktu Sayyidina Umar ra menemukan seorang *dzimmi* mengemis, maka ia mengambil keputusan untuk memberikan pensiun kepadanya, membebaskannya dari membayar *jizyah*⁴² dan menulis surat kepada bendahara negara tentang keadaannya.

⁴⁰ Abul A'la al-Maududi, *Khalifah dan Kerajaan, Op Cit*, hlm. 117

⁴¹ Abul A'la al-Maududi, *Khalifah dan Kerajaan, Op Cit*, hlm. 273

⁴² *Jizyah* adalah pajak warga negara non muslim dalam negara Islam

Apa yang telah disebutkan diatas adalah perlindungan yang sama terhadap umat muslim dan non muslim dalam negara Islam. Perlindungan yang sama diberikan terhadap warga negara tanpa membedakan suku dan keturunan, Badwi maupun Arab tetap punya hak dan kewajiban yang sama dalam negara Islam. Siapapun yang setia kepada negara Islam, berhak mendapat bantuan dan perlindungan tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum.⁴³

Doktrin persamaan antara manusia merupakan aksioma dalam Islam⁴⁴ sehingga perlakuan yang sama rata diantara manusia merupakan ciri-ciri masa Islam pertama, sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan jiwanya yang jauh dari segala bentuk *ashabiyah* yang bersifat kesukuan, kebangsaan atau keterikatan pada tanah air⁴⁵

Pada hakekatnya *Khulafa al Rasyidin* bukan merupakan suatu pemerintahan politik tetapi merupakan perwakilan sempurna yang menyeluruh dari *nubuwwah*, yakni fungsinya bukan hanya menjalankan tatanan negara serta menjalankan atau menjaga keamanan dan membela batas-batas negara saja, tetapi disamping itu juga meneruskan kewajiban seorang *mursyid*.⁴⁶

Seorang cendekiawan muslim, Prof. Jurji Zaidan menjelaskan negara para *Khulafa al Rasyidin* dibangun atas asas taqwa dan dijalankan dengan keadilan. Sedangkan para khalifah adalah orang yang paling sederhana diantara mereka dalam kehidupannya. Kekhalifahan dimasa mereka lebih

⁴³ Pasal XVI piagam tertulis Nabi Muhammad saw di Madinah th I H (622 M) tanda lahirnya negara Islam

⁴⁴ Syafi'i Marif, *Op Cit*, hlm. 22

⁴⁵ Abu A'la Al Maududi, *Khilafah wa al Mulk, Op Cit*, hlm. 126

⁴⁶ *I b i d*, hlm. 135

mirip bila dikatakan sebagai bertujuan keagamaan, dibanding kepentingan kenegaraan.⁴⁷

Setelah berakhirnya *Khulafa al Rasyidin* kondisi pemerintahan semakin berubah, khalifah yang melekat pada diri penguasa hanya sekedar lambang dan pemerintahanpun telah berusaha menjadi otokrasi dan jauh dari tendensi semula.

Tahapan yang dilalui untuk berubah menjadi kerajaan itu kita lihat sebagai berikut;

- Awal perubahan

Awal dari perubahan ini telah nampak ketika Usman mengangkat kaum kerabatnya menjadi pemegang kendali pemerintahan, padahal ini tak pernah dilakukan pendahulunya.⁴⁸

- Tahapan kedua

Terbunuhnya sayyidina Usman adalah sebagai akibat amarah yang tak terkendali dari massa yang didominasi oleh penduduk Basrah, Kuffah dan Mesir.⁴⁹

- Tahapan ketiga

Keretakan dalam tubuh kekhilafahan makin tampak dan secara berangsur menuju kerajaan setelah terpilihnya Ali bin Abi Thalib, hal ini dikarenakan;

- a. Ikut serta para pemberontak dalam pemilihan khalifah.
- b. Sikap netral yang telah ditunjukkan oleh beberapa sahabat besar dalam persoalan bai'at kepada Ali

⁴⁷ Dhiya' ad-Din ar Rais, *Op Cit*, hlm. 327

⁴⁸ Abu A'la Al Maududi, *Op Cit*, hlm. 37

⁴⁹ *I b i d*, hlm. 151

- c. Penuntutan bela atas kematian Usman r.a oleh dua kelompok. Pertama dipimpin oleh Aisyah r.ha dan Thalhah bin Zubair, sedangkan kelompok kedua dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Shofyan⁵⁰
- Tahapan keempat
Terjadinya peperangan yang tak dapat dielakkan antara muslim yang kita kenal dengan perang Jamal dan perang Shiffin⁵¹
 - Tahapan kelima
Pemecatan Muawiyah Abi Sofyan dari jabatan di Syam membuatnya semakin ingin membalas kematian Usman, salah satu cara yang dilakukannya bagi menarik massa adalah dengan memamerkan gamis Usman yang penuh bercak darah dan juga potongan jari Nailah istri sayyidina Usman r.a.⁵²
 - Tahapan keenam
Hasil dari keputusan *tahkim* antara Amr bin Ash dan Abu Musa Al Asy'ari, utusan dari kelompok Muawiyah dan Ali r.a. Keputusan ini berakhir dengan tidak seimbang karena kelicikan utusan Muawiyah sebagai khalifah pengganti Ali r.a.⁵³

Begitulah tahapan yang dilalui umat Islam sehingga menghilangkan sistem khilafah dan menuju bentuk pemerintahan baru, yaitu otokrasi. Selain itu, banyak hal-hal yang dizaman *khalifah al rasyidah* tidak lagi dipraktekkan dimasa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan khalifah Usmaniyah, sehingga terjadi penghapusan sistem pemerintahan khilafah

⁵⁰ *I b i d*, hlm. 159

⁵¹ *I b i d*, hlm. 165

⁵² *I b i d*, hlm. 180

⁵³ *I b i d*, hlm. 182

dari Turki dan diikuti oleh Ali Abdur Raziq di Mesir. Khilafah benar-benar hanya menjadi alat pemersatu saja dan tidak lebih dari itu.

3. KHILAFAH DALAM PANDANGAN ULAMA DAN TOKOH POLITIK

a. Pandangan kaum Sunni

Pada bagian ini penulis akan memaparkan bagaimana pandangan yang berlaku dikalangan Sunni tentang khilafah. Untuk mewakili golongan ini penulis hanya membatasi pada dua orang tokoh saja, yaitu Husain Haikal dan Muhammad Rasyid Ridha.

Muhammad Husain Heikal (30 Agustus 1888 M s/d 8 desember 1956 M) mengatakan bahwa pendapat Ali Abdur Raziq mengenai pemerintahan khalifah yang senantiasa diiringi oleh penekanan dan ketajaman pedang adalah tidak benar, beliau membantah pendapat penulis buku *al-Islam wa Ushul al-Hukm* tentang pembaiatan khalifah Abu Bakar. Beliau mengatakan;

Pembaiatan Abu Bakar sepenuhnya diperoleh dengan persetujuan masyarakat dan lahir dari permusyawaratan yang bebas dari tekanan. Melalui cara demokratis seperti yang berlaku di Republik-Republik modern dewasa ini. Adapun kekuasaan Abu Bakar diperoleh melalui ketajaman pedang adalah sesat, dan tidak ada seorangpun yang pernah mengatakan hal itu.⁵⁴

⁵⁴ Dhiya' ad-Din ar-Rais, *Op Cit*, hlm. 218

Inti dari pikiran Heikal sebenarnya adalah bahwa prinsip-prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan yang diberikan oleh Al Qur'an dan sunnah tidak ada yang berkaitan secara langsung dengan ketata-negaraan.⁵⁵

Selanjutnya bisa dilihat bagaimana pandangan Muhammad Rasyid Ridha terhadap sistem pemerintahan khilafah dan pranata-pranatanya. Khilafah sebagai alat pemersatu seluruh umat sangat diperlukan, ia yakin bahwa khilafah amat diperlukan dan harus dipertahankan di Istambul. Dia tetap menolak gagasan nasionalisme Arab yang menurutnya akan memperlemah dunia Islam. Ia sangat setia kepada Daulah Umayyah dan ia punya pendirian yang kokoh agar khilafah tidak dihapuskan. Namun akhirnya ia kecewa ketika pada tahun 1922 Mustafa Kamal Attaturk membekukan kekuasaan Sultan pada tahun 1924 menghapuskan lembaga Khilafah.⁵⁶

Menurut beliau, khalifah sebagai Amirul Mukminin yang punya tugas ganda yakni mengatur kehidupan duniawi disamping mengelola masalah agama. Dalam hal ini beliau mengutamakan musyawarah, untuk menghindari terjadinya kekuasaan absolut pada seorang penguasa. Juga menekankan diutamakannya maslahat atau kepentingan umat. Untuk bisa melaksanakan tugas ini maka seorang khalifah harus punya kemampuan berijtihad.⁵⁷ disamping kemauan untuk berjihad, ia juga menyetujui bahwa khalifah haruslah keturunan Quraisy.

⁵⁵ Munawir Sazali, *Op Cit*, hlm. 182-188

⁵⁶ *I b i d* , hlm. 131

⁵⁷ Aqid Suminto, *Op Cit*, hlm. 85

Tidak seperti Muhammad Abduh yang menyokong sistem demokrasi, maka Rasyid Ridha termasuk orang yang konservatif, bercorak kaku dalam pandangan politiknya, karena ingin menghidupkan kembali khalifah atas dasar hak Quraisy.⁵⁸

Dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk kesatuan, umat perlu membentuk negara, negara yang dianjurkan oleh Rasyid Ridha adalah negara dalam bentuk khilafah, dengan kepala negara seorang khalifah. Khalifah diharapkan seorang mujtahid besar, dibawah pimpinannya kemajuan umat dapat diwujudkan.⁵⁹

Bantahan Rasyid Ridha terhadap buku yang dikarang oleh Ali Abdur Raziq dituangkan dalam bukunya *Al Islam wa Ushul al-Hukum, Bahts fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Isma'liyah bain Dakwah Jadidah illa Nafsi Bina'iha wa Tadhil abnaiha (Islam dan prinsip-prinsip pemerintahan: seruan baru pada penghancuran bangunannya dan penyesatan pengikutnya)*.⁶⁰ Didalam buku ini dikatakan bahwa musuh-musuh Islam terus menerus mencoba menghapuskan Islam dan menipu baik melalui ideologi dan pemikiran, perusakan akidah, akhlak dan lain-lainnya, guna menjadikan mereka sebagai santapan orang-orang yang tamak, selain itu juga menjadi mangsa kebengisan penjajah. Serbuan politik ilmiah terhadap Islam ini jauh lebih berbahaya ketimbang perang salib yang mengatas namakan agama. Kemenangan puncak yang telah mereka

⁵⁸ Ahmad Sya'fi Ma'arif, *Op Cit*, hlm. 45

⁵⁹ Harun Nasution, *Op Cit*, hlm. 75

⁶⁰ Dhiya' ad-Din ar Rais, *Op Cit*, hlm. 75

peroleh dari perang ini adalah penghapusan khalifah oleh negara Turki. Negara itu dibentuk menjadi negara Republik tanpa ikatan syariat Islam. Ia menyerang seluruh dunia Islam serta melaksanakan garis politik mereka yang sekularistis.

b. Pandangan Syi'ah tentang Khalifah

Kaum Syi'ah berpendapat bahwa jabatan kepala negara bukanlah hak tiap orang Islam, bahkan tidak pula menjadi hak tiap orang Quraisy, sebagaimana disebutkan oleh sebagian besar Ahlus Sunnah. Dalam pandangan Syi'ah Imamiyah, jabatan kepala negara adalah hak monopoli Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Perlu ditegaskan bahwa nama yang dipakai golongan Syi'ah untuk kepala negara adalah Imam.⁶¹

Sesuai dengan paham yang dibawa oleh Muawiyah, Imamah dalam teori Syi'ah mempunyai bentuk kerajaan dan turun-temurun dari Bapak keanak, seterusnya kecucu dan demikian selanjutnya. Semestinya yang menggantikan Nabi Muhammad sebagai kepala dalam pandangan Islam Syi'ah adalah anak beliau. Tetapi karena beliau tidak mempunyai anak laki-laki yang hidup, maka jabatan itupun seharusnya jatuh ketangan keluarga beliau yang terdekat.

Ali bin Abi Thalib adalah anak dari paman beliau, dan yang terpenting lagi beliau adalah menantu Rasulullah, karena itu Ali adalah keluarga Nabi yang terdekat. Dengan demikian yang menggantikan Nabi Muhammad sebagai kepala negara adalah Ali dan keturunannya, bukannya

⁶¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta ; Bulan Bintang, cet. I, 1974), hlm. 97

Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Usman bin Affan, dan dilanjutkan dengan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Oleh karena itu khalifah Abu Bakar dan seterusnya tidak diakui oleh kebanyakan kaum Syi'ah, demikian juga pemerintahan dinasti Umayyah dan Abbasiyah.

Dalam sejarah, mereka aktif menentang dinasti Umayyah dan bekerja sama dengan Abbasiyah dalam upaya menjatuhkan kerajaan yang dibentuk oleh Muawiyah bin Abi Shofyan. Imam dalam pandangan Syi'ah mempunyai sifat kekudusan yang diwarisi dari Nabi, dalam arti menerima waris dari Nabi dan demikianlah seterusnya. Disamping itu Imam mempunyai kekuasaan membuat hukum, perbuatan serta ucapannya tidak bisa bertentangan dengan syariat. Dengan demikian bagi kaum Syi'ah, Imam hampir sama sifat sifat dan kekuasaannya dengan sifat dan kekuasaan Nabi. Perbedaan yang ada hanyalah karena Nabi menerima wahyu sedangkan Imam tidak.

Dikalangan golongan Syi'ah Imamiyah terdapat paham yang ekstrim. Sehubungan dengan kesucian imam dari perbuatan salah, mereka berpendapat bahwa jika sekiranya Imam melakukan kesalahan maka perbuatan itu sebenarnya tidak salah, dengan kata lain perbuatan yang bagi manusia biasa merupakan kesalahan maka bagi Imam itu bukanlah kesalahan. Imam mempunyai ilmu bathin dan dengan ilmu tersebut ia mengetahui hal-hal yang tersembunyi bagi manusia. Apa yang salah dalam pandangan manusia biasanya tidak mesti salah dalam pandangan Imam.

Bahkan ada yang berpendapat Tuhan mengambil tempat dalam diri Imam, oleh karena itu ada Imam yang disembah.

B. PANDANGAN ALI ABDUR RAZIQ TERHADAP SISTEM KHILAFAH

1. PENOLAKAN TERHADAP SISTEM KHILAFAH

Penolakan Ali Abdur Raziq terhadap khilafah seperti yang ditulis dalam bukunya tak lain karena melihat bahwa tidak ada hal-hal yang menguntungkan dari adanya khilafah ini. Apa yang dilihatnya selama ini tak lain hanyalah pertumpahan darah, yang menjadi pijakan atas kekhilafan itu selamanya adalah paksaan dan penekanan. Sejarah belum pernah menuturkan adanya pemerintahan seorang khalifah yang tidak dibarengi dengan paksaan senjata dan kekuatan penekanan yang mengelilinginya.⁶²

Apa yang ada dalam pikiran Ali Abdur Raziq yang dituangkannya dalam *Al Islam wa Ushul al-Hukm* tentang pertumpahan darah memang benar adanya. Namun ini tidak berarti kita harus menolak sebuah sistem, sebab yang bertindak demikian terjadi setelah khilafah *murni* berevolusi menjadi kerajaan. Tetapi pada masa *khulaur rasyidin* hal seperti yang disebut tidak terjadi. Pengangkatan dan pemilihan seorang khalifah melalui musyawarah *ahl halli wa al-aqdi* dan dibaiat oleh seluruh umat Islam tanpa dilatar belakangi oleh penekanan, paksaan dan pertumpahan darah. Jika demikian, Khilafah, selamanya hanya merupakan bencana bagi Islam.

⁶² Dhiya' ad-Din ar-Rais, *Op Cit*, hlm. 120

Sebuah negara amat penting memiliki satu bentuk pemerintahan, yakni untuk mengatur segala macam persoalan. Dalam pandangan Ali Abdur Raziq, setiap bangsa yang beradab, baik yang beragama maupun yang tidak beragama, harus memiliki satu pemerintahan yang mengatur segala persoalan mereka. Bentuk dan cirinya bermacam-macam; Demokrasi, Otokrasi, Theokrasi, Konstitusional maupun Otoriter. Para sarjana dan tokoh politik berbeda pendapat tentang bentuk mana yang paling baik dan cocok. Namun yang pasti, bahwa suatu bangsa mesti memiliki sistem pemerintahan.

Penghapusan khilafah pada tahun 1924 oleh Musthafa Kamal Attaturk dan ini diikuti oleh argumentasi intelektual dari Ali Abdur Raziq yang menolak keseluruhan bentuk pemerintahan khilafah sejak pemerintahan *Khulafa al Rasyidin*. Seharusnya Ali Abdur Raziq tidak perlu meragukan khilafah diawal sejarah, walaupun beliau ingin mendukung Kamal Attaturk. Apa yang dilakukan Kamal jauh berbeda dengan apa yang dilakukannya, ia tidak punya latar belakang dan tendensi yang jelas sebagaimana yang dimiliki oleh Attaturk.

Hendaknya kaum muslimin tidak melupakan bahwa daulah Usmaniyah bukanlah cerminan khilafah yang benar seperti yang diharapkan garis politik Islam. Sementara itu, kewajiban penting lainnya seperti musyawarah, berlaku adil, menggali ilmu yang memungkinkan terciptanya kekuatan dan jihad yang seirama dengan perkembangan zaman telah mereka abaikan, sehingga daulah ini menjadi terkebelakang serta tidak memperoleh kemajuan yang berarti, baik dalam bidang sosial dan politik, sementara negara-negara lain telah mencapai kemajuan yang cukup pesat.

Kalau kita telusuri kesalahan fatal ini tidak sepenuhnya terletak pada khilafah, melainkan beberapa faktor yang membelit masyarakat, seperti faktor administrasi negara, ekonomi dan politik kenegaraan. Sementara itu, secara aktual kehancurannya bukanlah ditangan khilafah sendiri, melainkan disebabkan oleh rezim militer yang menguasai pemerintahan dan mengungkung khalifah sejak masa Sultan Abdul Hamid. Sedangkan politik mereka saat itu adalah bersifat nepotisme dan tidak demokratis, materialis bukan Islamis, otoriter dan tidak berasaskan musyawarah. Pada masa pemerintahan inilah munculnya berbagai kebobrokan dan kemunduran negara yang bertepatan dengan berakhirnya perang dunia I.⁶³

Apa yang telah didaftarkan tersebut menyebabkan Mustafa Kamal Attaturk memakzulkan khalifah terakhir dan menghapuskan khilafah daulah Usmaniyah. Disamping itu ada tendensi dari Kemal ingin menjadi kepala negara Turki dan merubah bentuknya menjadi negara sekuler.

Khilafah walau bagaimanapun juga tetap merupakan bagian dari sejarah umat Islam, dan salah satu kewajiban yang ditetapkan syariat serta kelanjutan perjalanan kaum muslimin. Banyak tujuam dan kemaslahatan yang tak mungkin direalisasikan tanpa adanya khilafah, dan berbagai kewajiban lain yang mesti dilaksanakan. Dengan khilafah, persatuan dan solidaritas kaum muslimin dapat digalang, serta risalah dan kekuatannya bisa diwujudkan. Kalaupun pada realitannya khalifah-khalifah pada daulah Usmaniyah memakai istilah Sultan, maka bukan berarti khalifah tidak baik dan mesti dihapuskan. Jelas-jelas ditegaskan agar umat Islam dapat menarik

⁶³ Dhiya' ad-Din ar-Rais, *Op Cit* , hlm. 254

garis perbedaan antara prinsip dan pokok dengan pelaksanaannya, demikian juga antara sistem dengan pribadi yang melaksanakannya.

Khilafah itu sendiri jika dilaksanakan sesuai dengan tuntunan moral yang telah digariskan didalam Al Qur'an dan Sunnah maka pasti ia akan menjadi sistem yang paling baik, bahkan yang terbaik diantara sistem yang ada dalam yang dikenal manusia pada saat ini. Hal ini telah dibuktikan melalui keempat khalifah dizaman *Khulafa al Rasyidin* atau khalifah sesudahnya seperti Umar bin Abdul Aziz. Juga terdapat beberapa Sultan Islam yang lebih tepat disebut khalifah seperti sulthan Nuruddin dan juga Sultan Salahuddin. Pemerintahan dimasa mereka benar-benar merupakan *prototype* khalifah yang benar dan amat langka dalam sejarah umat Islam.⁶⁴ Kesimpulannya adalah apa yang pada suatu waktu dapat diwujudkan pasti pada masa yang lain dapat direalisasikan juga.

Penghapusan khalifah oleh Mustafa Kamal Attaturk memang sulit untuk kita terima setidaknya bagi umat yang merindukan khilafah, namun setidaknya ia memiliki argumentasi yang konkrit dan tidak terasa dicari-cari. Sayangnya seorang ulama seperti Ali Abdur Raziq telah keliru dengan menyusun karya intelektual yang dinilai kurang etis dari sudut peradaban Islam, ia terlalu demonstratif. Apa yang ditulisnya membuat orang menilai seolah-olah bermaksud menghapuskan khilafah mulai dari asasnya, meretas cabang dan merobohkan batangnya. Ia menyerang khilafah sejak dari pertumbuhan pertamanya dalam Islam, bahkan sempat menanyakan eksistensi Rasulullah, beliau seorang raja atau Rasul. Sebenarnya ia tak mungkin dapat

⁶⁴ *I b i d* , hlm. 256

menghancurkan khilafah kecuali menunjukkan serangan kesisi ajaran praktis dan pelaksanaan syariatnya. Apa yang dapat disimpulkan tentang penolakan beliau terhadap sistem pemerintahan khilafah adalah sebagai berikut: Ali Abdur Raziq memandang bahwa dalam Al Qur'an hanya terdapat konsep global tentang pemerintahan yaitu; keadilan, persatuan (persamaan) dan musyawarah, maka beliau menyatakan bahwa tidak hanya sistem khilafah yang paling pantas dianut. Keempat khilafah besar memang dianggap cocok untuk menjadi idola karena mereka adalah para mujtahid besar dan ulama yang sangat disegani, begitu juga dengan Salahuddin al-Ayyubi dan juga Sultan Nuruddin. Namun dikarenakan prosentase yang sangat kecil dan memandang bahwa khalifah-khalifah yang lain itu tidak dapat menjadi khalifah yang baik, maka ia sangat menentang adanya sistem pemerintahan khilafah.

2. BENTUK NEGARA DAN KONSEP PEMERINTAHAN

Kita temui dalam sejarah perkembangan politik Islam tokoh-tokoh yang berbicara dan mengeluarkan pendapat mengenai teori kenegaraan. Al-Mawardi adalah tokoh pemula yang mengungkap masalah kenegaraan. Para penulis teori kenegaraan sesudah beliau pada umumnya mengikuti arus pemikirannya dan mengembangkan hanya pada bagian-bagian kecilnya saja.⁶⁵ Akan tetapi apa yang terjadi pada Ali Abdur Raziq, perlawanan ideologi terasa amat kentara, mungkin ada sedikit persamaan dengan Mustafa Kamal

⁶⁵ Munawir Sazali, *Op Cit*, hlm. 42

Attaturk. Namun perlu kita ingat bahwa beliau ini bukanlah seorang ulama, melainkan hanya seorang tokoh politik.

Buku yang ditulisnya bermula dengan penolakan secara tegas akan bentuk khilafah, dengan alasan-alasan yang telah dideteksi dan diterangkannya dengan sempurna sekali, dengan cara menilik ulang sejarah pemerintahan para khalifah. Apa yang menjadi inti dari serentetan peristiwa yang telah didiskripsikan itu adalah bahwa menegakkan negara perlu, akan tetapi bukan sistem khilafah dan negara itu bukan negara agama. Beliau juga mengakui bahwa umat Islam memerlukan pemerintahan walau bukan diwajibkan oleh nash agama, dan bukan pula seperti yang ada dalam sejarah, karena pemerintahan khilafah yang berlalu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bentuk pemerintahan itu hanya merupakan bencana bagi Islam dan umatnya, selalu melahirkan kebobrokan dan keburukan. Sekali lagi perlu diingat, bahwa negara agama tidak ada, yang mesti ada adalah pemerintahan duniawi, dengan kata lain negara sekuler.

Model yang diperlukan dan diinginkan Ali Abdur Raziq seperti tercantum dalam bukunya, bahwa pemerintahan tidak memerintah atas nama agama, tidak ada sangkut pautnya dengan agama, akan tetapi ia diperlukan oleh umat untuk mengatur dan memelihara urusan mereka. Beliau tidak melihat adanya hak pemerintah atas nama agama. Karena itu bisa ditarik kesimpulan, bila dikaitkan dengan empat pola dasar pemerintah seperti yang diterangkan pada bab sebelumnya, maka negara yang diinginkan oleh tokoh ini adalah negara model ketiga; negara sekuler yang tidak mementingkan dan

mengurusi agama, dengan pengertian lain negara adalah untuk negara bukan untuk agama. Agama adalah hak pribadi.⁶⁶ Sebagaimana kaum orientalis berpendapat bahwa negara Turki menjadi maju karena telah mencontoh apa yang diajarkan Eropa sekuler.

Negara model inilah yang dianjurkan Ali Abdur Raziq, karena menurutnya negara sekuler tidak akan terlalu menekan umat. Selain dari bentuk yang dikemukakan, bisa dipilih bentuk dan sistem pemerintahan yang cocok untuk diterapkan dinegara muslim. Dari bentuk dan sisi yang telah ada barangkali itulah alternatif yang paling cocok untuk diteliti kemudian dilaksanakan, jika dibandingkan dengan beberapa tokoh yang memaksakan suatu bentuk untuk dianut. Keadaan serupa ini tidak seharusnya terjadi, sebab hanya akan membuat manusia menjadi statis dan egois. Sudah sepantasnya kebebasan untuk memilih bentuk yang terbaik diberikan kepada kaum muslimin, agar umat menjadi dinamis dan maju.

Selain dari kebenaran yang muncul dari pemikiran beliau, barangkali ada hal yang pantas dinilai dan dikritik, yakni sifat ekstrimnya dalam hal penolakan khilafah. Apa yang diharapkan adalah jika beliau ingin menentang khilafah, maka alasan yang diberikan harus sejalan dengan fakta serta alternatif dan jalan keluarnya. Argumentsi menolak sistem khilafah tidak boleh terlalu dicari-cari dan yang terpenting adalah menjadikan *Khulafa al Rasyidin* sebagai standar penilaian sepanjang sejarah ketatanegaraan Islam.

⁶⁶ Ali Abdur Raziq, *Op Cit*, hlm. vi

Dari apa yang telah dideskripsikan dalam tulisannya terlihat bahwa Ali Abdur Raziq tidak memberikan garis tegas dan *sample* dari bentuk-bentuk negara ideal yang diinginkan. Apa yang diharapkan adalah bahwa beliau hendaknya memberikan beberapa alternatif dari bentuk negara dan sistem pemerintahan, sehingga dapat dijadikan tolak ukur dan kerangka acuan dalam menetapkan mana yang patut ditetapkan. Beliau hanya menetapkan secara tersembunyi bahwa negara itu hendaknya bersifat sekuler dan mengurus negara tanpa agama.

BAB IV

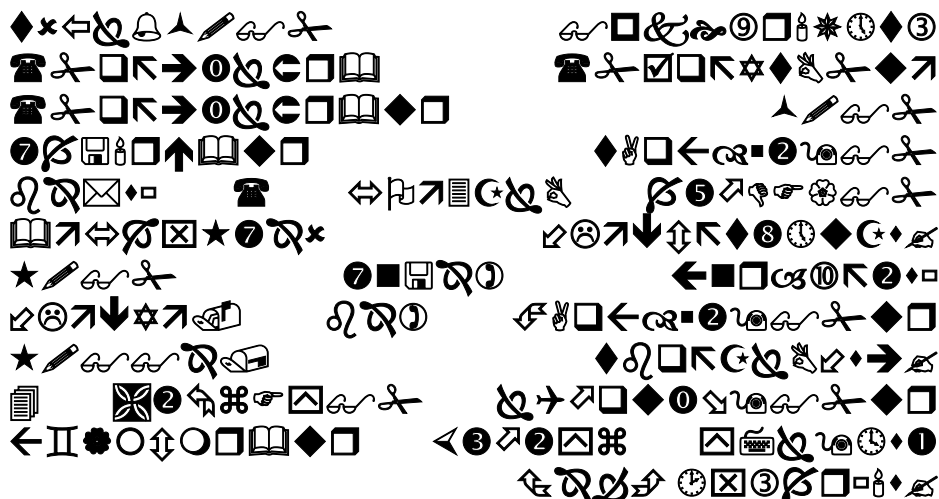
ANALISIS TERHADAP KONSEP KHILAFAH

MENURUT ALI ABDUR RAZIQ

A. ANALISIS TERHADAP KONSEP AL QUR'AN TENTANG PEMERINTAHAN DALAM PANDANGAN ALI ABDUR RAZIQ

Al Qur'an merupakan sumber dari segala sumber hukum Islam. Setiap ayat yang diturunkan oleh Allah SWT terkait dengan hal-hal yang dipermasalahkan umat dalam kehidupan. Setiap kali umat menghadapi kesulitan atau ketika nabi akan berbuat kesalahan, maka Allah SWT akan menurunkan wahyu, sehingga Rasulullah akan senantiasa berada di jalur yang lurus.

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 59:



Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman dengan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya".

Dalam ayat diatas terkandung maksud bahwa Allah dan Rasulnya adalah referensi yang tak pernah punah sampai kapanpun juga. Untuk bertanya kepada Allah secara langsung tak akan mungkin dapat dilakukan, begitu juga dengan Rasulnya. Sebab itu peninggalannya yang dijadikan rujukan yakni Al Qur'an dan As Sunnah.

Allah telah menjamin bahwa apa yang diperselisihkan akan ada jawabannya. Kalau tidak tertulis secara nyata tetap akan diperoleh jawaban setelah ulama mentakwilkan ayat-ayat Allah. Al Qur'an bukanlah kitab undang-undang dengan fasal penjelasan, tapi pengembangan ayat bisa diperoleh dari Hadits maupun hasil ijtihad para ulama. Seandainya ijtihad yang telah bakupun tidak menerangkan masalah yang timbul belakangan, ulama diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menggunakan akal, mentakwilkan ayat Allah yang *mutasyabihat*.

Berbicara masalah teori kenegaraan dan politik, Al Qur'an juga memberikan seperangkat pranata yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. Tentang corak pemerintahan tidak disinggung di dalam Al Qur'an, oleh karena itu tidak terdapat ketentuan dan bentuk baku corak negara. Yang penting dipahami hanyalah asal saja tidak lari norma yang digariskan oleh Al Qur'an dan as Sunnah.

Seperti yang diketahui Al Qur'an bukanlah kitab politik yang khusus mengatur corak dan bentuk negara Islam. Kalau disimak, didalam Al Qur'an memang tidak ada suatu surat khusus yang membahas tentang politik dan negara, seperti halnya surat An-Nisa' yang banyak berbicara tentang kaum wanita.

Dalam analisis penulis, Al Qur'an hanya memberikan etika kepemimpinan dan peraturan yang dianut sebuah negara. Misalnya, perintah untuk melaksanakan prinsip musyawarah untuk mufakat, meski caranya tidak tertulis. Demikian juga prinsip menegakkan keadilan, persamaan hak serta persaudaran dan seterusnya. Seandainya Al Qur'an mencantumkan secara faktual bentuk dan sistem pemerintahan, maka Islam tidak akan lagi menjadi agama yang bisa menjawab tantangan zaman dan cocok untuk segala waktu. Ajaran Islam akan terasa kaku dan tidak fleksibel, sebab apa yang ada di dunia ini terikat oleh waktu dan zaman. Bila waktu dan zaman bergeser, sudah barang tentu peraturan akan berubah. Oleh karena itu Islam tidak menghendaki umat menjadi statis dengan hanya menganut sebuah sistem. Jika keadaan demikian melanda umat, maka kemajuan dan kemunduran tak akan bisa dielakkan lagi.

Dalam surat An-Nisa' telah diterangkan tentang dasar-dasar pemerintahan dalam Islam, cara berperang dalam Islam, keharusan menegakkan kebenaran dan keadilan dan seterusnya. Itulah diantara etika yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan sebuah pemerintahan. Mengenai bentuk negara, apapun boleh dianut oleh umat, dengan syarat tidak boleh menyimpang dari pranata yang telah ada. Jadi jelas bahwa sistem pemerintahan apapun boleh dianut oleh umat Islam. Apabila Islam hanya memberikan satu saja bentuk negara seperti khalifah, tentu ini tidak akan cocok dengan semua negara, sebab situasi dan kondisi sangat mempengaruhi kebutuhan manusia.

Di dalam buku *Al-Islam wa Ushul al Hukm*, Ali Abdur Raziq menyebutkan; kenyataan yang sebenarnya bahwa Islam tidak mengenal lembaga khilafah, sebagaimana yang dikenal oleh kaum muslimin.¹

Apa yang dikemukakannya merupakan satu pernyataan yang punya arti cukup dalam, ini menunjukkan Islam tidak ada kaitannya sedikitpun dengan lembaga Khilafah. Khilafah yang bercorak Islamis sekalipun pada zaman *Khulafa al Rasyidin*. Ia hanya sebuah sistem duniawiyah yang sepenuhnya berbeda dan bertentangan dengan agama, serta memiliki tujuan-tujuan yang bercorak duniawiyah seperti mempertahankan kerajaan, penaklukan dan kolonialisme, sama sekali tidak merealisasikan kaedah agama.

Dunia adalah lawan dari agama, oleh karena itu hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan tak akan diatur dengan agama, sebab dua hal yang bertentangan tidak akan dapat berkumpul dalam satu keadaan. Selain itu dunia hanya akan membuat Allah SWT menjadi rendah kedudukannya sebagai pembuat hukum.²

Dalam hal ini jika dilihat realitas yang sebenarnya, dunia tidak akan membuat Allah menjadi hina, bahkan dengan menciptakan lalat sekalipun. Manusia tidak akan hidup dalam dunia, tapi apa yang dilakukannya punya konsekuensi untuk dipertanggung-jawabkan diakhirat kelak. Pemerintahan adalah sebagai sarana untuk beribadah dan menjalankan perintah Allah, merealisasikan prinsip keadilan, persamaan hak dan permusyawaratan, hendaknya selalu diingat bahwa dunia adalah jembatan menuju akhirat.

¹ Ali Abdur Raziq, *Op.Cit*, hlm. 163

² Dhiya' ad-Din ar-Rais, *Op.Cit*, hlm. 191

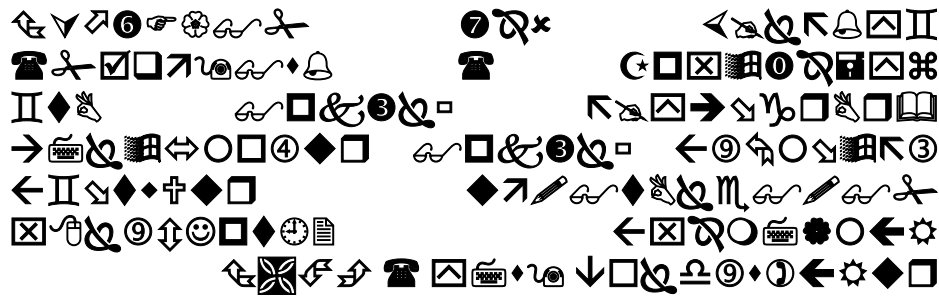
Semuanya terserah kepada kaum muslimin untuk mempertimbangkan dengan akal atau melalui kaedah politik. Masalah yang berkenaan dengan organisasi kemiliteran Islam, pemerintahan daerah, pengorganisasian negara dan lain sebagainya, semua tidak ada kaitan dengan agama dan sepenuhnya diserahkan kepada kemampuan akal, pengalaman manusia, strategi pertempuran, perhitungan arsitek dan pandangan para cendekiawan. Demikian pendapat Raziq.

Ada satu hal lagi yang kita garis bawahi dari ucapan didalam buku Raziq tersebut, yaitu bahwa ulama tidak mengemukakan satupun dalil yang kuat menentanginya, ulama hanya mendasarkan pandangan pada ijma', analogi logika dan hukum logika.

Kalau diteliti memang benar bahwa Al Qur'an tidak menjelaskan dalil-dalil yang cocok tentang khilafah. Kalimat khalifah yang ada dalam Al Qur'an bukan ditunjukkan pada makna seorang pemimpin negara, melainkan pemimpin secara umum. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30:



³ *Ibid*, hlm. 193



Artinya: "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi mereka berkata; mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) dimuka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah..."

Menurut ulama perkataan "khalifah" bukanlah untuk memerintahkan melainkan dalam hal "sayyidatul alam" atau mengurus dan mengelola alam, dan tentang bagaimana cara memelihara alam itu diserahkan pada rekayasa manusia sendiri. Karena itu tidak mungkin para ulama mencocokkan ayat dengan situasi dan kondisi, walaupun sebenarnya tidaklah relevan. Sebagai jalan keluar maka ulama berijtihad dan terciptalah ijma' ulama.

Ijma' ulama memang terjadi dalam sejarah, sebab pada hakekatnya setelah wafatnya Rasulullah SAW tidak boleh tidak harus ada seorang yang menggantikan kedudukan beliau sebagai seorang pemimpin negara, melindungi umat dan menyiarkan agama keseluruh dunia. Karena argumen-argumen yang demikianlah maka ulama mengambil kebijaksanaan bahwa mendirikan pemerintahan itu penting dengan merujuk kepada *Khulafa al Rasyidin*. Dan dikarenakan sistem ini bisa membuktikan kemampuannya mengendalikan umat, maka ulama berijtihad.

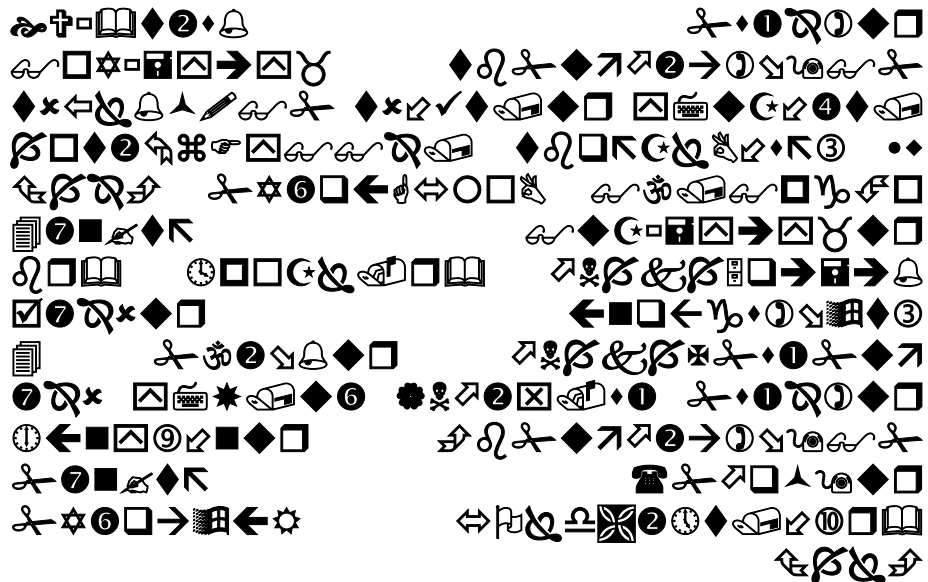
Para ulama mewajibkan sistem ini atas dasar wajib *aqli* bukan wajib *naqli*. Apabila Ali Abdur Raziq mau menelusuri secara keseluruhan buku para ulama dan ilmu kalam, niscaya ia akan menemukan bahwa ulama telah menetapkan panutan pertama khilafah atas dasar *ijma'*. Yang terjadi dikalangan para sahabat Rasulullah sebab mereka adalah generasi pertama umat Islam. Setelah itu mereka adalah orang-orang yang bergaul rapat dengan Rasul, menyertai jihadnya, mendengar langsung ucapan dan keterangan beliau. Seiring dengan wafatnya Rasul, telah tercapai konsensus bahwa tidak bisa tidak harus ada orang yang menggantikan beliau dan mereka telah sepakat pula memilih khalifah, serta tidak ada seorangpun diantara mereka yang mengatakan tidak diperlukan seorang khalifah bagi kaum muslimin.⁴ Dengan argumentasi ini, telah terbuktilah Konsensus mereka tentang wajibnya eksistensi khalifah, dan inilah prinsip *ijma'* yang menjadi sandaran sistem khalifah.

Dalam pandangan penulis, khilafah itu perlu akan tetapi ini tidak bermaksud bahwa setiap negara Islam harus memegang teguh sistem khilafah. Hal ini sudah barang tentu tidak akan bisa terjadi secara mudah, sebab belum tentu ia cocok untuk berbagai negara. Ada kemungkinan juga terjadi suatu peristiwa dimana sistem khilafah tidak lagi sesuai dengan zaman. Selain dari apa yang telah dikemukakan diatas, Allah juga memberikan jaminan kebebasan kepada umat untuk memilih yang terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan-Nya. Sesungguhnya Al Qur'an telah memberikan gambaran tentang pranata-pranata dalam kehidupan dan umat Islam harus bisa mengkajinya jika

⁴ Dhiya' ad-Din ar-Rais, *Op.Cit* , hlm. 211

ingin memperoleh hikmah, hanya orang kafirlah yang tidak dapat memahami Al

Qur'an. Firman Allah surat Al-Isra' 45-46:



Artinya: “Dan apabila kamu membaca Al Qur'an niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akherat suatu dinding yang tertutup. Dan kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al Qur'an niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya.

Dari ayat diatas dapat diambil hikmah bahwa sebagai umat yang mengaku beragama Islam harus berusaha semaksimal mungkin untuk menggali dan memahami apa yang tersurat dan juga yang tersirat di dalam Al Qur'an. Sehingga tidak akan menjatuhkan vonis bahwa Al Qur'an tidak lengkap, bahwa banyak hal-hal yang tidak tertuang didalamnya.

Al Qur'an dengan tegas memberikan batasan kepada umat Islam agar tidak mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Firman Allah SWT:

1. Surat An-Nisa' ayat 139:



Artinya: "Orang-orang yang mengambil orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan disisi orang-orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah.

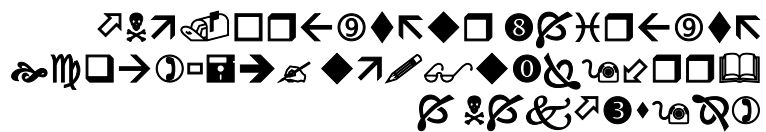
2. Surat An-Nisa' ayat 144:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali (teman yang akrab, pelindung dan penolong) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Ingatlah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu.

3. Surat Al Maidah ayat 57:

Artinya: "Hari orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil menjadi pemimpin orang-orang yang membuat agamamu menjadi buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal".

4. Surat Al Mumtahanah ayat 1:



Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil musuhmu menjadi teman setia kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad)*”.

B. KEDUDUKAN ALI ABDUR RAZIQ DALAM KONSTALASI PEMIKIRAN POLITIK DUNIA ISLAM

Sebagai seorang ulama yang cukup kontroversial dikalangan masyarakat tentu saja menjadi masalah jika mengadakan reformasi yang tiba-tiba dan menelurkan ide yang dipandang cukup berani.

Dunia politik Islam kedatangan seorang tokoh baru yang berasal dari keluarga politikus, nama besar Ali Abdur Raziq cukup cepat tersebar dikalangan tokoh-tokoh politik Islam maupun non Islam, hal ini dikarenakan beliau adalah seorang ulama besar Al-Azhar, juga seorang pemegang banyak jabatan.

Dalam konstalasi politik dunia Islam dan non Islam, ide baru dan kritik berani biasa saja terjadi, kadang kala hal ini membawa kepada keuntungan. Menurut analisis penulis, apa yang dihasilkan oleh Ali Abdur Raziq selain menolak khilafah, juga untuk membangun umat yang sedang dalam tidur lena. Selama kurun waktu yang panjang umat Islam mengalami kemunduran yang hebat dalam bidang ilmu pengetahuan dibanding abad-abad kejayaan (sebelum abad kebangkitan kembali Islam).

Dalam situasi dan kondisi seperti ini diperlukan seorang yang membangunkan umat dari tidur panjang, dan dalam pandangan penulis beliau termasuk dalam golongan tersebut. Terbukti setelah momen penting dalam sejarah ini terjadi, bermuncullah tokoh-tokoh politik yang menganalisis dan mengkritik pemikiran Ali Abdur Raziq. Dunia Islam mulai dibangun serentak walau itu baru sebatas bidang politik dan kenegaraan. Meskipun pada teorinya banyak sekali kecaman yang ditunjukkan kepada beliau, yang akhirnya mahkamah agung Al-Azhar menjatuhkan vonis kepada beliau, namun patut disyukuri karena umat Islam secara berangsur bangkit dari keterlenuaan.

Ada pandangan bahwa penulis *al-Islam wa Ushul al-Hukm* ini bukanlah Ali Abdur Raziq melainkan seorang orientalis yang mencetak nama beliau.⁵ Dengan adanya pendapat semacam ini akan semakin membuka mata bahwa diluar golongan umat Islam ada kaum orientalis yang menteror umat, selain itu motivasi para tokoh dan ulama untuk memajukan Islam dan mengejar ketertinggalan semakin besar.

Dalam percaturan politik dunia Islam, masalah pemerintahan memang masih menjadi problem besar yang perlu mendapat penanganan sepenuhnya. Semua tokoh politik punya ide yang bagus tentang hal ini, sama dengan Ali Abdur Raziq, dan ide yang keluar sudah barang tentu sangat berbeda, selain didasarkan kepada latar belakang pendidikan juga harus diperhatikan faktor kepentingan, karena tidak terelakkan juga kepentingan pribadi sang tokoh.

⁵ *I b i d.*, hlm. 214

Dr. Muhammad Al-Bahiy sama sekali tidak setuju dengan pendapat Ali Abdur Raziq bahwa jihad Rasulullah semata-mata bertendensi ekspansionis, dengan tegas beliau menyamai tokoh ini dengan apa yang tertuang dalam syair az-Zuhamwi;

*Ditentukan kemenangan di atas bumi bagi manusia yang lengkap senjata untuk perang yang menang hanyalah orang yang telah mempersiapkan senjata untuk bertempur.*⁶

Muhammad Iqbal dalam bukunya menjelaskan, agama dan negara seharusnya tidak terpisah tetapi bersatu, dan pemisahan agama dan negara dalam agama Kristen hanyalah sebagai akibat dari negara itu dilahirkan bukan sebagai kesatuan politik. Agama dan negara merupakan kekuatan yang saling berhadapan, karena itu agama dipisahkan dari negara. Hal ini tidak perlu terjadi dalam Islam karena sejak awal Islam merupakan suatu agama yang menangani problema kemasyarakatan.⁷

⁶ *I b i d.*, hlm. 166

⁷ Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, (Delhi ; Lihoti Fine Art press, 1981), hlm. 154

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam kehidupan politik di Mesir Ali Abdur Raziq dan keluarganya dikenal sebagai tokoh-tokoh politik, mereka berasal dari partai *ahrar ad-dusturiyyin*, sebuah partai yang mendapat perlindungan Inggris dan saingan ketat partai *al-Ittihad* dukungan Raja. Namun setelah *al-Islam wa ushul al-hukm* beredar dan menjadi perdebatan hangat, karirnya dibidang politik dan juga ilmu pengetahuan menjadi runtuh.
2. Bentuk pemerintahan khilafah lahir sebagai proses evolusi karena kebutuhan akan seorang pemimpin sepeninggal Rasulullah yang sangat mendesak. Maka diambil mufakat sebagai hasil dari musyawarah untuk membaiai Abu Bakar menjadi seorang khalifah yang mempunyai tugas ganda, sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara. Sebagaimana tokoh lain, Ali Abdur Raziq juga mempunyai pandangan tersendiri tentang konsep pemerintahan khilafah. Beliau secara terang-terangan menentang dan meragukan eksistensinya dalam Islam.
3. Penolakan beliau terhadap sistim khilafah sebenarnya didasari oleh pendapat bahwa pengangkatan khalifah didukung oleh kekuatan senjata dan pedang, demikian juga pelestarian kekuasaan senantiasa dipagari kekuatan bersenjata. Meskipun kekuatan itu tidak digunakan, namun keberadaannya tetap diakui. Pernyataan seperti itu keliru sebab hanya

sebagian kecil pemakaian kekerasan dalam ajaran Islam. Umat harus kembali kepada pemerintahan ideal di zaman *khulafa al rasyidin* yang tidak menyimpang dari apa yang digariskan oleh Rasulullah dalam sunnahnya.

4. Islam memberikan garis kebebasan kepada umat untuk memilih apa yang terbaik dengan catatan tidak menyimpang dari jalan Allah. Islam tidak memberikan patokan khusus tentang bentuk-bentuk pemerintahan yang harus dianut oleh umat dalam bernegara. Ali Abdur Raziq memilih untuk menerapkan sekularisme yang mengurus agama, karena Islam sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah keduniaan seperti pemerintahan, hal itu diserahkan pada kemampuan akal untuk memilih mana yang terbaik.
5. Bukunya menilai Islam berdasarkan prinsip yang dipegang oleh orang-orang Barat terhadap agama Kristen. Ketika dihadapkan pada nash kedua sumber Islam (Al Qur'an dan as Sunnah) yang menyatakan Islam adalah agama dan Negara, maka beliau memiliki dua sikap yakni menafsirkan diluar batasan pengertian agama menurut pemahaman orang Barat (tidak ada hubungan antara agama dan politik), serta yang kedua menerima anggapan bahwa Islam berhubungan dengan politik dan ini yang dibebankan kepada Rasul. Hubungan Islam dengan politik hanya diperlakukan pada masa kepemimpinan Rasulullah dan tidak lebih dari itu.
6. Di abad modern khilafah sangat sukar didirikan, dikarenakan sukarnya mencari tokoh yang paling cocok untuk itu. Selain terjadi perbedaan pendapat dan keanekaragaman kehendak dan keinginan umat. Hal ini

sangat jauh perbedaannya jika kita bandingkan dengan situasi umat zaman Rasulullah dan *khulafa al rasyidin*.

B. SARAN-SARAN

1. Umat Islam harus memiliki sebuah organisasi permanen yang mengurus kepentingan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Ia merupakan lembaga yang memiliki corak kepemimpinan internasional, dimana keputusannya diambil dengan musyawarah dan bersifat mengikat. Semua negara Islam hendaknya bergabung di dalamnya, dimana setiap negara memiliki perwakilan tetap. Harus dipilih seorang yang punya potensi besar, politikus dan cendekiawan muslim.
2. Walaupun namanya berbeda dengan khilafah, negara-negara Islam (termasuk negara Malaysia yang berpenduduk sebagian besar beragama Islam) hendaknya menjadikan wadah ini sebagai pengganti dari khilafah, sebab walau bagaimanapun khilafah itu sendiri sukar sekali direalisasikan dizaman sekarang. Hendaknya lembaga gabungan ini memegang kendali pimpinan untuk mewujudkan cita-cita khilafah walau nama itu sudah tidak eksis lagi. Dalam bentuk persoalan yang bersifat umum, lembaga ini memberikan hak otonomi kepada negara anggota, dengan kata lain diberikan kebebasan mengurus rumah tangganya sendiri. Dan inilah satu bentuk khilafah di abad modern yang tidak terpusat pada suatu tangan, melainkan dalam suatu sistem persatuan, demokratis, bercorak musyawarah dan persekutuan.

Demikianlah laporan penelitian ini penulis susun dengan berbagai kekurangan karena keterbatasan ilmu dan faktor lain, semoga tulisan ini bermanfaat bagi berbagai pihak. Teguran yang sifatnya melengkapi keberadaan penulisan ini sangat kami harapkan. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya bagi kita semua.

Wallahu a'lamu bi al-shawab

DAFTAR BACAAN

Al-Quranul Karim

Ali Abdur Raziq : *Khalifah dan Pemerintahan dalam Islam*, Ali Audah (penterj). Bandung ; Pustaka, cet. I, 1985

Ahmad Athiyatullah. *Al Qamus Al Islami*, Qahirah Maktabah Nahdlah Al Mishriyah, cet. I, Muharram 1387 (Mei 1966)

Amal, Taufik Adnan. *Islam dan Tantangan Modernitas (Study atas Pemikiran Hukum Fazlurrahman)*. Bandung ; Mizan, cet. I, 1985

Ar rais, Dhiya' ad-din, *Islam dan Khalifah (Kritik terhadap Al Islam wa Ushul Al Hukm)*. Bandung; Mizan, cet. I, 1985

Abdul A'la Al Maududi, *Islamic Way of Live*, Lahore West Pakistan ; Islamic Publication ltd, Shah Alam Market, 1976

Abul A'la Al Maududi. *Sistem Politik Islam*, Asep Hikmat (penterj). Bandung ; Mizan, cet. I, 1990

Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Matan al-Bukhari*, Surabaya ; Al Maktabah al Ashriyah, juz IV

Muhammad Hamidullah. *Pengantar Study Islam*, Chotib (penterj). Jakarta , Bulan Bintang, cet I, 1974

Departemen Agama RI, *Terjemah Al-Qur'anul Karim*

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta ; Balai Pusataka, cet III, 1989

Montgomery Watt, *Muhammad Nabi dan Negarawan*, Djohan Effendi (penterj). Jakarta ; C.V. Kuning mas, cet III, 1984

Hamidullah, dkk, *Politik Islam (Konsepsi dan Dokumentasi)*, Surabaya ; Bina Ilmu, cet I, 1897

Harun Nasution. *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta ; Bulan Bintang, cet VIII, 1990

-----, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta ; Bulan Bintang, cet I, 1974

-----, (penyunting). *Perkembangan Modern Dalam Islam*, Jakarta ; Yayasan Obor Indonesia, cet I, 195

Jamaluddin Kafie, *Islam: Agama dan Negara*, Surabaya ; Bina Ilmu, cet I, 1987

- J.J. Rousseau. *The Sosial Contract and Discourse on the Origin of Inequality*. New York ; Washington Square Press, first pocket book, printing june, 1967
- Khalid Muhammad Khalid, *Karakteristik Peri Hidup Khalifah Rasulullah*. Bandung; Diponegoro, cet I, 1985
- Ibnu Taimiyah. *Pedoman Islam Bernegara*. Firdaus AN (penterj), Jakarta ; Bulan Bintang, cet III, 1977
- Ma'rif, Ahmad Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan (Study Percaturan Dalam Konstituante)*. Jakarta ; LP3ES, cet II, 1987
- Maryam Jameelah. *Islam dan Modernisme*. Surabaya ; Usaha Nasional, t.t
- Muhammad Natsir, *Capita Selecta*. Jakarta ; Bulan Bintang, cet III, 1973
- Muhammad al-Bahiy. *Pemikiran Islam Modern*. Jakarta, Panji Mas, cet I, 1986
- Abdul A'la Al Maududi, *Sistem Politik Islam*, Muhammad Al Baqir (penterj). Bandung ; Mizan, cet III, 1990
- Samih Athif Azzain, *Syariat Islam*, Mudzakir AS (penterj). Bandung ; Husaini, cet I, 1988
- Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta ; Gramedia, cet XI, 1988
- Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of religious thought in Islam*, New Delhi ; Lahati fine art press, 1981
- Syazali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta ; Universitas Indonesia, cet I, 1990
- Suminto, H. Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta ; LP3ES, cet I, 1985
- Sali Azzam, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*. Bandung ; Mizan. Cet II, 1990
- Sutrisno Hadi, *Bimbingan Menulis Skripsi dan Tesis*, jilid II, Yogyakarta ; Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, cet IV, 1989
- W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta ; Balai Pustaka, 1982
- W. Arnold, Thomas, *Sejarah Dakwah Islam*. Jakarta ; Wijaya, cet II, 1981

Zainal Arifin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad SAW*. Jakarta ; Bulan Bintang, cet III, 1983

Zahri Hamid, *Deklarasi Arafah*. Yogyakarta ; Bina Usaha, cet I, 1983

Zainuddin Hamidi, dkk, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, jilid I-IV. Jakarta ; Wijaya, cet XI, 1984